



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 3 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan adalah dengan ditetapkannya indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada di bawahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2013 - 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 );

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2006 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 29);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 - 2018.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2013 – 2018.

## Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Indikator Kinerja Utama digunakan untuk :

- a. menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- d. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- e. menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

## Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Magetan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 5 Januari 2015

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 5 Januari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
ttd  
MEI SUGIARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2015 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 3 TAHUN 2015

TANGGAL : 5 Januari 2015

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

VISI : Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Magetan yang adil, mandiri dan bermartabat

- MISI :
1. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
  2. Mewujudkan pemerintahan yang baik, dan peningkatan sumber daya manusia yang profesional, dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah;
  3. Menggairahkan perekonomian daerah, melalui berbagai program pengungkit, dan optimalisasi pengembangan sumber daya manusia serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
  4. Mewujudkan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai guna menunjang pertumbuhan ekonomi daerah; dan
  5. Mewujudkan suasana aman dan damai, melalui penegakan, kepastian dan perlindungan hukum.

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketahanan moral dan mental masyarakat untuk	1. Berkembangnya jumlah rumah ibadah	Jumlah rumah ibadah yang berdiri pada tahun berjalan dibandingkan rumah ibadah tahun sebelumnya	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
	membentengi diri dari krisis nilai sebagai akibat dari dampak negatif perubahan dan pembangunan	<p>2. Meningkatnya kegiatan keagamaan</p> <p>3. Prosentase sekolah yang melaksanakan metode pembelajaran agama secara kontekstual</p>	<p>Jumlah kegiatan keagamaan pada tahun berjalan dibandingkan kegiatan keagamaan tahun sebelumnya</p> <p>Jumlah sekolah yang melaksanakan metode pembelajaran agama secara kontekstual dibanding jumlah sekolah yang ada</p>	<p>Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah</p> <p>Dinas Pendidikan</p>	
2	Meningkatnya toleransi umat beragama	1. Jumlah penyelesaian konflik umat beragama	Jumlah konflik agama dibandingkan jumlah konflik agama yang berhasil diselesaikan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	<p>1. Peringkat kinerja otda</p> <p>2. Indek Kepuasan Masyarakat</p> <p>3. Nilai akuntabilitas kinerja yang meningkat</p>	<p>Peringkat kinerja yang diperoleh</p> <p>Nilai hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>Nilai akuntabilitas kinerja pada tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya</p>	<p>Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah</p> <p>Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah</p> <p>Bag. Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah</p>	



No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
		4. Hasil predikat pemeriksaan/pengawasan pengelolaan keuangan daerah	Nilai pemeriksaan/pengawasan pengelolaan keuangan pada tahun berjalan	Inspektorat	
		5. Prosentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	Program RPPJMD dibanding program RKPD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		6. Prosentase SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku	Jumlah SKPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku dibandingkan jumlah SKPD yang ada	Kantor Arsip dan Perpustakaan	
		7. Prosentase SKPD yang menyediakan data di website resmi	Jumlah SKPD yang menyediakan data di website resmi kabupaten dibandingkan jumlah SKPD yang ada	Kantor Arsip dan Perpustakaan	
		8. Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat struktural pada tahun berjalan	Badan Kepegawaian Daerah	
		9. Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis fungsional	Badan Kepegawaian Daerah	

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
		10. Jumlah PNS yang mengikuti Pendidikan kedinasan (tugas belajar)	Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan kedinasan (tugas belajar)	Badan Kepegawaian Daerah	
		11. Pejabat yang mengikuti fit and profer test	Jumlah pejabat yang mengikuti fit and proper test	Badan Kepegawaian Daerah	
4	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan	1. Prosentase penduduk ber KTP persatuan penduduk 2. Prosentase penduduk berakta kelahiran 3. Prosentase anak berakte kelahiran 4. Prosentase penduduk ber-KK	Jumlah KTP yang diterbitkan dibanding jumlah penduduk wajib KTP  Jumlah akta kelahiran yang diterbitkan dibandingkan jumlah penduduk  Jumlah anak yang memiliki akte kelahiran dibanding jumlah kelahiran anak pada tahun berjalan  Jumlah KK yang diterbitkan dibandingkan jumlah KK yang wajib ber-KK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
5	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal dengan memperhatikan kebijakan ekonomi regional, nasional dan global	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah kunjungan wisata/tahun</li> <li>2. Jumlah kluster ekonomi</li> <li>3. Jumlah industri kecil yang dibina</li> <li>4. Peningkatan budidaya ikan (ton)</li> <li>5. Peningkatan konsumsi ikan (Kg/kapita/th)</li> <li>6. Jumlah Pembudidaya Ikan (orang)</li> <li>7. Produksi perikanan tangkap (PUD) (ton)</li> <li>8. Jumlah produksi hasil pertanian</li> </ol>	<p>Jumlah kunjungan wisata pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah kluster ekonomi pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah industri kecil yang dibina pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah budidaya ikan pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah konsumsi ikan pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah pembudidaya ikan pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah produksi hasil pertanian pada tahun berjalan</p>	<p>Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga</p> <p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p> <p>Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>Dinas Peternakan dan Perikanan</p> <p>Dinas Pertanian</p>	

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
		9. Jumlah produksi peternakan 10. Jumlah produksi hasil hutan 11. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal 12. Prosentase pasar tradisional dalam kondisi baik 13. Cakupan bina kelompok pengrajin	Jumlah produksi peternakan pada tahun berjalan Jumlah produksi hasil hutan pada tahun berjalan Jumlah kelompok pedagang/usaha informal yang dibina pada tahun berjalan Jumlah pasar dalam kondisi baik dibanding jumlah pasar yang ada Jumlah kelompok pengrajin yang dibina pada tahun berjalan	Dinas Peternakan dan Perikanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
6	Meningkatnya kegiatan investasi untuk mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal	1. Jumlah realisasi investasi PMA/PMDN 2. Jumlah realisasi investasi non PMA/PMDN	Jumlah realisasi investasi PMA/PMDN pada tahun berjalan Jumlah realisasi investasi non PMA/PMDN pada tahun berjalan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
		3. Prosentase koperasi aktif	Prosentase koperasi aktif pada tahun berjalan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
		4. Jumlah UKM non BPR/ LKM	Jumlah UKM non BPR/ LKM pada tahun berjalan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
		5. Jumlah tenaga kerja yang diserap ;	Jumlah tenaga kerja baru	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		6. Jumlah UMKM	Jumlah UMKM yang ada pada tahun berjalan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
		7. Promosi peluang penanaman modal	Jumlah promosi penanaman modal	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
		8. Jumlah BPR/LKM	Jumlah BPR/LKM pada tahun berjalan	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	
7	Terwujudnya stabilitas pangan dan energi utama	1. Penguatan cadangan pangan ; 2. Skor pola pangan harapan	Jumlah cadangan pangan dibanding 100 ton dikali 100 % Skor pola pangan yang ada pada tahun berjalan	Badan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan	

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
		3. Ketersediaan energy dan protein per kapita  4. Jumlah titik pemasangan energy alternative terbarukan (biogas)	Prosentase ketersediaan energy per kapita per hari ditambah prosentase ketersediaan protein per kapita per hari dibagi dua  Jumlah titik pemasangan energy alternative terbarukan pada tahun berjalan	Badan Ketahanan Pangan  Bagian Administrasi Sumber Daya Alam	
8	Menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka	1. Penurunan angka kemiskinan  2. Tingkat pengangguran terbuka  3. Angka partisipasi angkatan kerja  4. Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan	Angka kemiskinan pada tahun berjalan  Angka pengangguran terbuka pada tahun berjalan  Angka partisipasi angkatan kerja pada tahun berjalan  PMKS yang memperoleh bantuan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi  Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
		5. Prosentase PMKS yang menerima program KUBE atau kelompok social ekonomi sejenisnya	PMKS yang menerima program KUBE pada tahun berjalan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		6. Jumlah transmigran ditempatkan	Jumlah transmigran yang ditempatkan pada tahun berjalan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		7. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Jumlah kelompok binaan LPM pada tahun berjalan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	
		8. Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan kewirausahaan pada tahun berjalan	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		9. Prosentase perusahaan yang menerapkan UMK dan K3	Perusahaan yang menerapkan UMK dan K3	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
9	Meningkatnya Indeks pembangunan manusia (IPM)	<p>1. Angka melek huruf</p> <p>2. Angka rata – rata lama sekolah</p> <p>3. Angka partisipasi kasar</p> <p>4. Angka partisipasi murni</p> <p>5. Angka putus sekolah</p> <p>6. Angka kematian bayi per 100 kelahiran hidup</p>	<p>Penduduk usia 15 tahun ke atas dapat baca tulis dibanding penduduk usia 15 tahun keatas</p> <p>Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yg diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan dibandingkan banyaknya murid usia 7-12, 13-15, 16-18 th</p> <p>Jumlah penduduk yang sekolah dibanding jumlah penduduk usia sekolah</p> <p>Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A dibanding Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn</p> <p>Jumlah siswa putus sekolah dibanding jumlah siswa pada tingkat dan jenjang yang sama</p> <p>Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) dibanding jumlah kelahiran hidup</p>	<p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Pendidikan</p> <p>Dinas Kesehatan</p>	



No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
		7. Angka usia harapan hidup	Angka usia harapan hidup pada tahun berjalan	Dinas Kesehatan	
		8. Prosentase balita gizi buruk	Jumlah balita gizi buruk dibanding jumlah bayi lahir pada periode tertentu	Dinas Kesehatan	
		9. Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian neonatal per kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	
		10. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	Jumlah kematian ibu yang melahirkan dibandingkan jumlah ibu yang melahirkan	Dinas Kesehatan	
		11. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun berjalan	Kantor Arsip dan Perpustakaan	
		12. Koleksi buku yang tersedia	Jumlah koleksi buku yang tersedia pada tahun berjalan	Kantor Arsip dan Perpustakaan	
		13. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1	Jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 pada tahun berjalan	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
10	Berkembangnya budaya lokal multikultur yang dapat menjadi media perekat sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk</li> <li>Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya</li> </ol>	<p>Jumlah grup kesenian pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya pada tahun berjalan</p>	<p>Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga</p> <p>Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga</p>	
11	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman yang layak dan sehat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen RDTRK</li> <li>Prosentase rumah layak huni</li> <li>Kawasan rawan kumuh</li> <li>Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah per HPL/HGB</li> <li>Prosentase penanganan sampah perkotaan</li> </ol>	<p>Ada/tidak</p> <p>Jumlah rumah layak huni dibandingkan jumlah rumah yang ada</p> <p>Jumlah kawasan rawan kumuh pada tahun berjalan</p> <p>Luas ruang terbuka hijau (RTH) per satuan luas wilayah per HPL/HBG pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah sampah perkotaan yang ditangani pada tahun berjalan</p>	<p>Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya</p> <p>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya</p> <p>Badan Lingkungan Hidup</p> <p>Badan Lingkungan Hidup</p>	

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
		6. Rumah tangga pengguna air bersih  7. Rumah tangga bersanitasi  8. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih pada tahun berjalan  Jumlah rumah tangga bersanitasi pada tahun berjalan  Jumlah bangunan ber-IMB per satuan bangunan pada tahun berjalan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya  Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya  Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	
12	Terwujudnya alam dan lingkungan hidup yang lestari	1. Luas lahan kritis tertangani  2. Kerusakan kawasan hutan  3. Luas kawasan lindung	Luas lahan kritis yang tertangani pada tahun berjalan  Luas kerusakan kawasan hutan pada tahun berjalan  Luas kawasan hutan lindung pada tahun berjalan	Dinas Kehutanan dan Perkebunan  Dinas Kehutanan dan Perkebunan  Dinas Kehutanan dan Perkebunan	
13	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana transportasi yang aman, nyaman dan memadai	1. Prosentase jalan kabupaten dalam kondisi baik  2. Jumlah jembatan kondisi baik	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibandingkan panjang jalan kabupaten keseluruhan  Jumlah jembatan dalam kondisi baik pada tahun berjalan	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya  Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
		3. Prosentase pemasangan marka jalan	Jumlah marka jalan dibandingkan jalan keseluruhan	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		4. Prosentase pemasangan rambu lalu lintas	Jumlah rambu lalu lintas yang dipasang dibandingkan rambu lalu lintas yang seharusnya dipasang	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		5. Prosentase uji KIR angkutan umum	Jumlah uji KIR Angkutan Umum dibandingkan Angkutan Umum yang wajib uji KIR	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
		6. Prosentase pemasangan penerangan jalan umum	Jumlah pemasangan PJU dibanding PJU yang seharusnya dipasang	Badan Lingkungan Hidup	
		7. Rasio load factor	Jumlah penumpang yang terangkut dibanding kapasitas tempat duduk penumpang	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
14	Meningkatnya kualitas, kuantitas dan jangkauan jaringan irigasi	1. Rasio jaringan irigasi kondisi baik	Panjang jaringan irigasi kondisi baik dibandingkan panjang jaringan irigasi keseluruhan	Dinas Pekerjaan Umum Pengairan	

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
15	Menurunnya kasus pelanggaran hukum serta gangguan keamanan ketertiban masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Angka kriminalitas</li> <li>2. Jumlah pelanggaran ketertiban umum</li> <li>3. Jumlah konflik social politik</li> <li>4. Rasio pos kamling per desa/kelurahan</li> <li>5. Rasio penegakkan perda/ jumlah pelanggaran perda</li> <li>6. Cakupan petugas linmas</li> <li>7. Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah</li> </ol>	<p>Jumlah angka kriminalitas pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah pelanggaran ketertiban umum pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah konflik social politik pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah pos kamling per desa/kelurahan dibanding jumlah pos kamling yang seharusnya ada</p> <p>Jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan dibanding pelanggaran perda yang dipantau/dilaporkan</p> <p>Jumlah petugas Linmas dibanding jumlah RT</p> <p>Jumlah kegiatan pembinaan poltik daerah pada tahun berjalan</p>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p>	

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
16	Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintah dalam mengurangi resiko bencana	1. Jumlah lembaga/orang siaga bencana terlatih	Jumlah orang/lembaga siaga bencana yang terlatih	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

1. Instansi : DINAS KESEHATAN KABUPATEN MAGETAN

Visi : Terwujudnya Masyarakat Magetan Mandiri untuk Hidup Sehat

Misi :

1. Mendorong terwujudnya Masyarakat untuk Hidup Sehat secara Mandiri
2. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah kesehatan
3. Mewujudkan, memelihara dan meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau
4. Meningkatkan dan mendayagunakan Sumber Daya Kesehatan
5. Memantapkan manajemen kesehatan yang dinamis dan akuntabel

Tugas : Memimpin, melaksanakan koordinasi dan melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang kesehatan.

Fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kesehatan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan
4. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati

<b>KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>DEFINISI OPERASIONAL &amp; FORMULA PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
I. <i>Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran untuk berperilaku hidup bersih dan sehat serta pemberdayaan masyarakat ke arah kemandirian</i>	1.Cakupan Rumah Tangga Sehat	$\frac{\text{Jumlah Rumah Tangga ber PHBS}}{\text{Jumlah Rumah Tangga yang dikaji}} \times 100\%$	Laporan Program	Bidang PSDK (Seksi Promkes)
	2.Cakupan Desa Siaga Aktif	$\frac{\text{Jumlah Desa Siaga Aktif}}{\text{Jumlah Desa yang Sudah Dilatih Bagas}} \times 100\%$	Laporan Program	Bidang PSDK (Seksi Pemberdayaan)
	3.Cakupan Posyandu PURI	$\frac{\text{Jumlah Posyandu Bersrata Purnama Mandiri}}{\text{Jumlah Posyandu seluruhnya}} \times 100\%$	Laporan Program	Bidang PSDK (Seksi Pemberdayaan)
II. <i>Meningkatkan keluarga sadar gizi dan perbaikan gizi masyarakat</i>	1.Persentase balita gizi buruk	$\frac{\text{Jumlah Balita Gizi Buruk}}{\text{Jumlah Balita}} \times 100\%$	Laporan Program	Bidang Kesga dan Gizi (Seksi Gizi)
	2.Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat Perawatan	$\frac{\text{Jumlah kasus gizi buruk yang mendapat perawatan}}{\text{Jumlah kasus gizi buruk yang ditemukan di suatu Wilayah kerja}} \times 100\%$	Laporan Program	Bidang Kesga dan Gizi (Seksi Gizi)
	3.Cakupan pemberian MP-ASI Balita Gakin Umur 6-24 bulan keluarga miskin	$\frac{\text{Jumlah balita usia 6-24 bulan dari Gakin yang Mendapat MP-ASI}}{\text{Jumlah seluruh balita usia 6-24 bulan dari Gakin}} \times 100\%$	Laporan Program	Bidang Kesga dan Gizi (Seksi Gizi)



	4. Balita yang ditimbang berat badannya (D/S)	Jumlah balita yang ditimbang seluruhnya (D) ----- x 100 % Jumlah seluruh balita yang ada di satu wilayah (S)	Laporan Program	Bidang Kesga dan Gizi (Seksi Gizi)
III. Menurunkan angka kesakitan dan kematian penyakit menular, tidak menular dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi serta pengamatan penyakit dalam rangka sistem kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah, ancaman epidemi serta bencana	1. Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI)	Jumlah desa/kelurahan UCI ----- x 100 % Jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada dalam satu wilayah	Laporan Program	Bidang P2PL (Seksi Pencegahan & Pengamatan Penyakit)
	2. Angka kejadian malaria per 1000 penduduk	Jumlah penderita positif malaria di suatu wilayah Kerja pada kurun waktu tertentu ----- x 1000 Jumlah penduduk berisiko di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama	Laporan Program	Bidang P2PL (Seksi Pemberantasan Penyakit)
	3. Penemuan dan penanganan penderita diare	Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani Di sarana kesehatan dan kader di suatu wilayah Tertentu dalam waktu satu tahun ----- x 100 % Jumlah perkiraan penderita diare pada satu Wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	Laporan Program	Bidang P2PL (Seksi Pemberantasan Penyakit)
	4. Penemuan dan penanganan penderita pneumonia balita	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun ----- x 100 % Jumlah perkiraan penderita Pneumonia Balita di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Laporan Program	Bidang P2PL (Seksi Pemberantasan Penyakit)

	5. Menurunkan angka kecacatan akibat kusta	Jumlah penderita kusta dengan cacat tingkat 2 Pada wilayah dan waktu tertentu ----- x 100 % Jumlah seluruh penderita kusta (PBTMB) baru yang ditemukan pada wilayah dan kurun waktu yang sama	Laporan Program	Bidang P2PL (Seksi Pemberantasan Penyakit)
	6. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita DBD	Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wilayah dalam waktu satu tahun ----- x 100 % Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama	Laporan Program	Bidang P2PL (Seksi Pemberantasan Penyakit)
	7. Angka Keberhasilan Pengobatan TB	Jumlah penderita baru BTA positif yang hasil pengobatannya sembuh dan Pengobatan lengkap ----- x 100 % Jumlah penderita baru BTA positif yang diobati	Laporan Program	Bidang P2PL (Seksi Pemberantasan Penyakit)
	8. Prosentase Penduduk 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	Jumlah penduduk 15-24 tahun yang bisa Menjawab dengan benar kuesioner pengetahuan Komprehensif tentang HIV ----- x 100 % Jumlah penduduk 15-24 tahun yang mendapatkan Penyuluhan	Laporan Program	Bidang P2PL (Seksi Pemberantasan Penyakit)
	9. Cakupan Penemuan AFP per 100.000 penduduk < 15 tahun	Jumlah kasus AFP non Polio yang dilaporkan ----- x 100 % Jumlah penduduk < 15 tahun	Laporan Program	Bidang P2PL (Seksi Pencegahan & Pengamatan Penyakit)
	10. Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	Jumlah KLB di desa/kelurahan yang ditangani < 24 jam dalam periode tertentu ----- x 100 % Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada Periode yang sama	Laporan Program	Bidang P2PL (Seksi Pencegahan & Pengamatan Penyakit)

	11. Deteksi dini/skrining penyakit tidak menular	Frekuensi deteksi dini/skrining penyakit tidak menular yang dilaksanakan dalam periode satu tahun	Laporan Program	Bidang P2PL (Seksi Pencegahan & Pengamatan Penyakit)
IV. Meningkatkan kualitas air bersih, sanitasi dasar, higiene sanitasi makanan minuman serta kualitas kesehatan lingkungan dan pengendalian faktor risiko dampak pencemaran lingkungan di masyarakat	1. Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM	Jumlah desa/kelurahan melaksanakan STBM ----- x 100 % Jumlah desa/kelurahan	Laporan Program	Bidang P2PL
	2. Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas	Jumlah penduduk memiliki akses air minum berkualitas ----- x 100 % Jumlah penduduk	Laporan Program	Bidang P2PL
	3. Persentase penduduk menggunakan jamban sehat	Jumlah penduduk menggunakan jamban sehat ----- x 100 % Jumlah seluruh penduduk yang ada	Laporan Program	Bidang P2PL
V. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan ibu, bayi, anak, remaja dan lanjut usia serta kesehatan reproduksi	1. Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup (KH)	Jumlah seluruh kematian bayi (0-11 bln) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x 1.000 KH Jumlah kelahiran hidup di wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Laporan Program	Bidang Kesga dan Gizi (Seksi Kesga)
	2. Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup (KH)	Jumlah seluruh kematian ibu pada masa hamil hingga nifas yang berkaitan dgn kehamilan dan persalinan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x 100.000 KH Jumlah kelahiran hidup di satu wilayah Kerja pada kurun waktu yang sama	Laporan Program	Bidang Kesga dan Gizi (Seksi Kesga)

	3.Persentase Kunjungan Ibu Hamil (K4)	Jumlah kunjungan ibu hamil ke-4 ----- x 100 % Jumlah sasaran ibu hamil dalam setahun	Laporan Program	Bidang Kesga dan Gizi (Seksi Kesga)
	4.Cakupan ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat Penanganan definitif di satu wilayah kerja Pada kurun waktu tertentu ----- x 100 % Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu Wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Laporan Program	Bidang Kesga dan Gizi (Seksi Kesga)
	5.Persentase Pertolongan Persalinan oleh tenaga kesehatan (Linakes)	Jumlah pertolongan persalinan oleh nakes ----- x 100 % Jumlah sasaran ibu bersalin dalam 1 tahun	Laporan Program	Bidang Kesga dan Gizi (Seksi Kesga)
	6.Cakupan pelayanan ibu nifas	Jumlah ibu nifas yang telah memperoleh 3 kali Pelayanan nifas sesuai standar di satu wilayah Kerja pada kurun waktu tertentu ----- x 100 % Seluruh ibu nifas di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Laporan Program	Bidang Kesga dan Gizi (Seksi Kesga)
	7. Cakupan Pelayanan Neonatal Lengkap (KnL)	Jumlah neonatus 6-28 hari yang telah memperoleh 3 kali pelayanan sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x 100 % Seluruh bayi di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama	Laporan Program	Bidang Kesga dan Gizi (Seksi Kesga)
	8.Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang tertangani ----- x 100 % Jumlah seluruh neonatus dengan koplikasi yang ada	Laporan Program	Bidang Kesga dan Gizi (Seksi Kesga)

	9. Persentase Kunjungan Bayi	Jumlah bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar ----- x 100 % Jumlah bayi dalam 1 tahun	Laporan Program	Bidang Kesga dan Gizi (Seksi Kesga)
	10. Cakupan pelayanan anak balita	Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan Pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali di satu Wilayah kerja pada waktu tertentu ----- x 100 % Jumlah seluruh anak balita di stu wilayah kerja Dalam waktu yang sama	Laporan Program	Bidang Kesga dan Gizi (Seksi Kesga)
	11. Persentase capaian Peserta KB Aktif	Jumlah peserta KB aktif ----- x100 % Jumlah PUS di wilayah kerja yang sama	Laporan Program	Bidang Kesga dan Gizi (Seksi Kesga)
	12. Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	Jumlah murid SD dan setingkat yang Diperiksa kesehatannya oleh tenaga kesehatan atau tenaga terlatih di 1 wilayah kerja pada kurun waktu tertentu ----- x100 % Jumlah murid SD dan setingkat di satu wilayah Kerja dalam kurun waktu yang sama	Laporan Program	Bidang Kesga dan Gizi (Seksi Kesehatan Anak, Remaja & Usila)
	13. Cakupan kunjungan pasien peserta BPJS	Jumlah kunjungan pasien peserta BPJS ----- x 100 % Jumlah seluruh pasien peserta BPJS	Laporan Program	Bidang PSDK (Seksi Pemberdayaan)
VI. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta	1. Pelayanan kesehatan dasar di Ponkesdes yang memenuhi standar	Jumlah ponkesdes yang memenuhi standart ----- x 100 % Jumlah seluruh ponkesdes	Laporan Program	Bidang Yankes (Seksi Kesehatan Dasar & Rujukan)

	2.Cakupan pelayanan perizinan bidang kesehatan	Jumlah pengajuan perijinan bidang Kesehatan yang diterima ----- x 100 % Jumlah pengajuan perijinan bidang kesehatan yang dilayani	Laporan Program	Bidang Yankes (Seksi Akreditasi, Registrasi & Sertifikasi)
	3.Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melakukan Survey IKM ----- x 100% Jumlah Puskesmas Se-Kab. Magetan	Survey	Bidang Yankes (Seksi KesDas & Rujukan)
	4.Cakupan Puskesmas yang sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang memenuhi Stadart ----- x 100% Jumlah Puskesmas Se-Kab. Magetan	Laporan Program	Bidang Yankes (Seksi Kesehatan Dasar & Rujukan)
VII.Meningkatkan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan yang lebih bermutu, bermanfaat dan aman	1.Ketersediaan Obat per kapita per tahun di sarana pelayanan kesehatan dasar (Rp/kapita)	Nilai obat stok awal tahun+nilai penerimaan obat Tahun berjalan per kapita ----- x 100 % Target pencapaian tahun berjalan per kapita	Laporan Program	Bidang Yankes (Seksi Farmakmin & Perbekkes)
	2.Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan	Jumlah item obat yang diterima ----- x 100 % Jumlah item obat yang dibutuhkan	Laporan Program	Bidang Yankes (Seksi Farmakmin & Perbekkes)
	3.Prosentase kecukupan alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya	Jumlah item alat kesehatan di Puskesmas dan jaringannya ----- x 100 % Jumlah standart item alat kesehatan di Puskesmas dan Jaringannya	Laporan Program	Bidang Yankes (Seksi Farmakmin & Perbekkes)
VIII.Meningkatkan pembinaan dan pengendalian thd pelaku produksi & distribusi sediaan farmasi, alkes dan makanan	1.Cakupan Pengelola OMKABA yang dibina	Jumlah pengelola OMKABA yang dibina ----- x 100 % Jumlah keseluruhan pengelola OMKABA	Laporan Program	Bidang Yankes (Seksi Farmakmin & Perbekkes)

	2.Cakupan Pembinaan / Pemantauan Obat, Makanan, Kosmetik, Bahan Berbahaya (OMKABA)	Jumlah sarana OMKABA yang dibina/dipantau ----- x 100 % Jumlah keseluruhan sarana OMKABA	Laporan Program	Bidang Yankes (Seksi Farmakmin & Perbekkes)
IX. <i>Terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM kesehatan</i>	1. Prosentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian	Jumlah data simpeg yang diupdate ----- x 100 % Jumlah seluruh data simpeg yang harus diupdate	Laporan Program	Bagian Sekretariat (Subbag Umum & Kepegawaian)
	2. Ratio Dokter per 100.000 penduduk	Jumlah Dokter ----- 100.000 penduduk	Laporan Program	Bagian Sekretariat (Subbag Umum & Kepegawaian)
X. <i>Terselenggaranya sistem informasi kesehatan yang terintegrasi</i>	Prosentase dokumen data dan informasi kesehatan yang disusun sesuai standar	Jumlah dokumen data dan informasi kesehatan yang disusun sesuai standar ----- x 100 % Jumlah seluruh data dan informasi kesehatan Yang dikelola	Laporan Program	Bidang PSDK (Seksi Pemberdayaan)

2. INSTANSI : DINAS PENDIDIKAN

VISI : Terwujudnya masyarakat Magetan yang berimtaq, berbudi pekerti luhur, cerdas, terampil dan kompetitif  
MISI :

- Mewujudkan peningkatan kualitas gedung dan sarana dan prasarana sekolah serta infrastruktur penunjang pendidikan
- Mewujudkan peningkatan pelaksanaan pendidikan yang berorientasi pada pembentuka akhlak mulia dan berbudi pekerti luhur
- Mewujudkan peningkatan kualitas perpustakaan sebagai sumber belajar di semua jenjang pendidikan
- Mewujudkan peningkatn pembinaan kualitas dan kompetensi guru guna peningkatan kesejahteraan
- Mewujudkan program wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun
- Mewujudkan program pemberian beasiswa pada semua jenjang pendidikan

TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

FUNGSI :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan
- Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya



NO .	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA/PEN ANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	2	3	4	5	6
1	Memantapkan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun ( termasuk pendidikan inklusif ) dan meningkatkan kualitas pendidikan usia dini melalui penyediaan saran prasarana serta tenaga pendidik dan kepedidikan yang berkualitas dan memadai serta dan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa keluarga miskin	Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )	Jml. Siswa pada jenjang <u>Tk/RA/Penitipan Anak</u> Jml anak usia 4-6 tahun X 100	Dinas Pendidikan	Untuk Mengukur jml anak usia emas
2	Menyelenggarakan pendidikan dan non formal serta menuntaskan pemberantasan buta	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf ( tdk buta huruf )	Pend. usia 15th <u>keatas dapat baca tulis</u> Penduduk usia 15 th ke atas X 100	Dinas Pendidikan	Unt mengukur jml penduduk yg bisa baca tulis
3	Memanfaatkan pelaksanaan wajib belajar 12 th ( termasuk pendidikan inklusif ) dan meningkatkan kualitas pendidikan usia dini	Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/Paket A	Jml siswa usia 7-12 th <u>dijenjang SD/MI/Paket A</u> Jml penduduk kelompok usia 7-12 th X 100	Dinas Pendidikan	Untuk mengukur jml penduduk usia sekolah SD yg duduk di bangku SD

	melalui penyediaan sarana prasarana serta tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas dan memadai serta pemberian bantuan biaya pendidikan bagi siswa keluarga miskin					
		Angka partisipasi murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Jml. Siswa usia 13-15 th <u>di jenjang SMP/MTs/Paket B</u> Jml. Penduduk kelompok usia 13-15 th	X 100	Dinas Pendidikan	Untuk mengukur jml. Penduduk usia sekolah SMP yg duduk di bangku SMP
		Angka partisipasi murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	Jml siswa usia 16-18 th <u>dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C</u> Jml penduduk kelompok usia 16-18th	X 100	Dinas Pendidikan	Untuk mengukur jml penduduk usia sekolah SMA yg duduk dibangku SMA
		Angka putus sekolah (APS) SD/MI	Jml putus sekolah <u>pd tingkat &amp; jenjang SD/MI</u> Jml siswa pd tingkat yg sama & jenjang SD/MI pd th ajaran sblmnya	X 100	Dinas Pendidikan	Untuk mengukur ketuntasan program wajar dikdas 12 th
		Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	Jml Putus Sekolah <u>pd tingkat &amp; jenjang SMP/MTs</u> Jml siswa pd tingkat yg sama dan jenjang SMP/MTs pd tahun ajaran sebelumnya	X 100	Dinas Pendidikan	Untuk mengukur ketuntasan program wajar dikdas 12 th
		Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	Jml putus sekolah <u>pada jenjang SMA/SMK/MA</u> Jml siswa pada jenjang SMA/SMK/MA pd th ajaran sblmnya	X 100	Dinas Pendidikan	Untuk mengukur ketuntasan program wajar dikdas 15 th

		Angka kelulusan ( AL ) SD/MI	<u>Jml lulus pada jenjang SD/MI</u> Jml siswa tingkat tertinggi pd jenjang SD/MI pd tahun ajaran sebelumnya	X 100	Dinas Pendidikan	Untuk mengukur keberhasilan belajar siswa jenjang SD/MI
		Angka kelulusan (AL ) SMP/MTs	<u>Jml lulusan pd jenjang SMP/MTs</u> Jml siswa tingkat tertinggi pd jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya	X 100	Dinas Pendidikan	Untuk mengukur keberhasilan belajar siswa jenjang SMP/MTs
		Angka kelulusan (AL ) SMA/SMK/MA	Jml lulusan <u>pd jenjang SMA/SMK/MA</u> Jml siswa tingkat tertinggi pd jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya	X 100	Dinas Pendidikan	Untuk mengukur keberhasilan belajar siswa jenjang SMA/SMK/MA
		Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	Jml siswa baru <u>tingkat I pada jenjang</u> Jml lulusan pd jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya	X 100	Dinas Pendidikan	Mengukur transisi siswa sd ke smp
		Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	Jml siswa baru <u>tingkat I pada jenjang</u> Jml lulusan pd jenjang SMP/MTs tahun ajaran sebelumnya	X 100	Dinas Pendidikan	Mengukur transisi siswa smp ke sma
		Guru yg memenuhi kualifikasi S1/DIV	Jml guru <u>Berijasah kualifikasi S1/DIV</u> Jml Guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA	X 100	Dinas Pendidikan	Mengukur standar mengajar

3. INSTANSI : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

VISI : Terwujudnya kesejahteraan sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang mandiri dan berkualitas

MISI :

- a) Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat melalui upaya-upaya bantuan dan pemberdayaan PMKS ( Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ) dan PSKS ( Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial )
- b) Meningkatkan bantuan dan pemberdayaan sosial fakir miskin dengan menumbuh kembangkan kesadaran, kepercayaan serta penguatan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, kegotongroyongan yang mandiri dan berkualitas
- c) Terwujudnyakesejahteraan bagi peyandang disabilitas, keterlantaran dan tuna sosial sehingga dapat melakukan fungsi sosialnya secara wajar
- d) Terwujudnya lapangan kerja baru sehingga mampu memacu turunya tingkat pengangguran terbuka ( TPT )
- e) Tersedianya tenaga kerja yang berkualitas sehingga mampu bersaing, baik lokal, regional, nasional maupun internasionall
- f) Terwujudnya hubungan industrial yang harmonis untuk mewujudkan iklim usaha yang sehat
- g) Mewujudkan calon transmigran yang berkualitas sehingga diperoleh peningkatan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan keluarga

TUGAS : Memimpin, melaksanakan koordinasi dalam merumuskan perencanaan, kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pengelolaan di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

FUNGSI :

- a. perumusan kebijaksanaan, di bidang usaha kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- b. penyelenggaraan koordinasi di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang kesejahteraan sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS )	Prosentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( PMKS ) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	Jml PMKS yg memperoleh <u>bantuan sosial dlm 1 th</u> Jml PMKS skala kab./kota dalam 1 tahun yg seharusnya memperoleh bantuan sosial X 100	Dinsosnakertrans	Dinsosnakertrans
2	Tersedianya sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Prosentase (%)panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Jumlah panti sosial skala kabupaten/kota dalam 1th yang menyediakan sarana prasarana pelayanan <u>kesejahteraan sosial</u> Jumlah panti sosial skala kab/kota dalam 1 tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial X 100	Dinsosnakertrans	Dinsosnakertrans
3	Jumlah pencari kerja yang di tempatkan	Prosentase (%) pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	<u>Pencari kerja yg ditempatkn</u> Pencari kerja yang terdaftar X 100	Dinsosnakertrans	Dinsosnakertrans
4	Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Prosentase (%) partisipasi angkatan kerja	<u>Jumlah angkatan kerja</u> Jml pend.usiakerja(15-64th) X 100	Dinsosnakertrans	Dinsosnakertrans

4. INSTANSI : DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

VISI : Terwujudnya Usaha Industri Dan Perdagangan Yang Maju, Mandiri Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

MISI :

1. Mewujudkan SDM perindustrian dan perdagangan yang profesional
2. Mewujudkan peningkatan produksi dan nilai tambah serta pemanfaatan hasil potensi daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
3. Mendorong tumbuh kembangnya usaha industri dan perdagangan
4. Memacu peningkatan daya saing pengembangan industri

TUGAS : Memimpin, Merumuskan kebijakan, Melaksanakan Koordinasi, Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka Penyelenggaraan Kegiatan di bidang industri, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar.

FUNGSI :

- Perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan bidang industri, perdagangan dan pasar;
- Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan Industri, Perdagangan dan Pasar;
- Pelaksanaan Koordinasi Dalam Rangka Pembinaan dan Bimbingan Teknis di Bidang Industri, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar;
- Pelaksanaan Pemberian Izin Kegiatan di Bidang Industri dan Perdagangan;
- Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian di Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- Pelaksanaan Fasilitasi Promosi dan Pemasaran serta Pengembangan Kerja Sama antar Daerah dalam rangka Peningkatan Produksi Industri Kecil Menengah (UKM); dan
- Pelaksanaan Tugas-Tugas dinas lain Yang diberikan oleh Bupati.

NO	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya pemasaran produk-produk Kabupaten Magetan melalui perluasan jaringan pasar dan sarana dan prasarana pasar yang memadai	Jumlah UKM / IKM yang mengikuti kegiatan pasar lelang, misi dagang dan pameran	$\frac{\text{Jumlah UKM/IKM yang mengikuti pasar Lelang, misi dagang dan pameran}}{\text{Kegiatan yang dilaksanakan selama setahun}} \times 100 \%$	Laporan program	Bidang Bina Perdagangan dan Pasar
		Pasar yang representatif	$\frac{\text{Jumlah kios pasar yang direhabilitasi}}{\text{Jumlah los yang dimiliki}} \times 100 \%$ $\frac{\text{Jumlah los yang direhabilitasi}}{\text{Jumlah los yang dimiliki}} \times 100 \%$	Laporan program	Bidang Bina Perdagangan dan Pasar
		Kemudahan perijinan pasar tradisional	$\frac{\text{Jumlah kios yang dimiliki}}{\text{Jumlah pasar milik Pemkab. Magetan yang memperoleh ijin operasional dan dokumen lingkungan}} \times 100 \%$	Laporan program	Bidang Bina Perdagangan dan Pasar
		Akses informasi mengenai sembako	$\frac{\text{Jumlah pasar tradisional di Kab.Magetan}}{\text{Pasar yang dimonitoring harga sembako}} \times 100 \%$	Laporan program	Bidang Bina Perdagangan dan Pasar
		Antisipasi kenaikan harga sembako	$\frac{\text{Terlaksananya kegiatan pasar murah/bazar bersubsidi di beberapa kecamatan}}{\text{Kegiatan yang dilaksanakan dalam setahun}} \times 100 \%$	Laporan program	Bidang Bina Perdagangan dan Pasar
2	Meningkatkan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Indek Kepuasan Masyarakat	Prosentase Kepuasan Masyarakat terhadap layanan	Laporan program	Bidang Bina Perdagangan dan Pasar

3	Meningkatnya Kualitas SDM dan produk makanan minuman yang diperdagangkan pedagang kaki lima dan asongan	<p>Prosentase Peningkatan UTTP bertanda tera sah</p> <p>Prosentase pengawasan barang dan jasa</p> <p>Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan</p> <p>Pengawasan kualitas produk makanan minuman yang diperdagangkan pedagang kaki lima dan asongan</p> <p>Pendataan Pedagang Kaki lima</p>	<p>Jumlah UTTP yang ditera sah</p> <hr/> <p>Jumlah UTTP yang ada di Kab. Magetan</p> <p>Jumlah barang dan jasa yang diawasi (th )</p> <hr/> <p>Jumlah barang dan jasa yang beredar</p> <p>Jumlah pedagang kaki lima yang Mengikuti Pembinaan</p> <hr/> <p>Jumlah pedagang kaki lima di kab. Magetan</p> <p>Meningkatnya Produk makanan minuman pedagang kaki lima diuji laboratorium</p> <hr/> <p>Jumlah produk makanan minuman pedagang kaki lima yang beredar</p> <p>Jumlah pedagang kaki lima yang terdata</p> <hr/> <p>Jumlah pedagang kaki lima di Kab. Magetan</p>	<p>Laporan program</p> <p>Laporan program</p> <p>Laporan program</p> <p>Laporan program</p>	<p>Bidang Bina Perdagangan dan Pasar</p> <p>Bidang Bina Perdagangan dan Pasar</p> <p>Bidang Bina Perdagangan dan Pasar</p> <p>Bidang Bina Perdagangan dan Pasar</p>
---	---	--	---	---	---



5. Instansi : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan

Visi : Terwujudnya Koperasi dan UMKM sebagai pelaku ekonomi yang sehat, tangguh, mandiri sesuai jati diri sebagai salah satu pilar perekonomian daerah kabupaten Magetan.

Misi : 1. Meningkatnya kinerja usaha koperasi dan UMKM  
2. Meningkatnya kualitas kelembagaan Koperasi;  
3. Meningkatkan pemberdayaan UMKM  
4. Meningkatkan penumbuhan wirausaha baru

Tujuan : 1. Terwujudnya peningkatan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi sesuai jati diri koperasi;  
2. Terwujudnya penumbuhan wirausaha baru berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi;  
3. Terwujudnya peningkatan nilai tambah UMKM terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto).

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di Bidang Koperasi dan UMKM.

Fungsi :  
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan UMKM;  
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang UMKM;  
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	2	3	4	5
Meningkatnya kinerja volume usaha koperasi dan UMKM	Return volume usaha koperasi terhadap modal	$\frac{\text{Volume Usaha}}{\text{Total Modal}} \times 100\%$	Bidang Usaha Koperasi	Kepala Bidang Usaha Koperasi

	Return SHU terhadap modal koperasi	$\frac{\text{Sisa Hasil Usaha (SHU)}}{\text{Jumlah Aset}} \times 100 \%$	Bidang Usaha Koperasi	Kepala Bidang Usaha Koperasi
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam koperasi	Pertumbuhan jumlah anggota Koperasi	$\frac{\Delta \text{ Jumlah anggota koperasi thn. N}}{\text{Jumlah anggota koperasi thn. N-1}} \times 100 \%$	Bidang Kelembagaan	Kepala Bidang Kelembagaan
	Presentase Koperasi Aktif	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}{\text{Total Koperasi}} \times 100 \%$	Bidang Kelembagaan	Kepala Bidang Kelembagaan
Meningkatnya kualitas KSP	Pertumbuhan KSP Sehat	$\frac{\Delta \text{ Jumlah KSP sehat tahun N}}{\Delta \text{ Jumlah KSP sehat tahun N-1}} \times 100 \%$	Bidang FP USP	Kepala Bidang Usaha Koperasi
Tumbuhnya wirausaha baru	Pertumbuhan wirausaha baru	$\frac{\Delta \text{ Jumlah WUB tahun N}}{\Delta \text{ Jumlah WUB tahun N-1}} \times 100 \%$	Bidang UMKM	Kepala Bidang UMKM
Meningkatnya akses pemasaran bagi UMKM	Pertumbuhan omset UMKM yang telah difasilitasi pemasarannya	$\frac{\Delta \text{ Jumlah Omset UMKM yg difasilitasi pemasarannya pada tahun N}}{\Delta \text{ Jumlah Omset UMKM yg difasilitasi pemasarannya pada tahun N-1}} \times 100 \%$	Bidang UMKM	Kepala Bidang UMKM

6. Instansi : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan
- Visi : Terwujudnya Pelayanan Prima Bidang Administrasi Kependudukan Berbasis Teknologi Informasi
- Misi :
1. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dalam pengurusan administrasi kependudukan berdasarkan Standart Pelayanan Yang Bersertifikat.
  2. Melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) berbasis teknologi informasi.
  3. Menyediakan data dan dokumen kependudukan secara akurat dan valid dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
  4. Menyediakan data dan dokumen kependudukan secara akurat dan valid dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.
  5. Meningkatkan pemanfaatan potensi Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, bimtek yang dapat mendukung tertib administrasi kependudukan.
- Tugas : Melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- Fungsi :
1. Pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan
  2. Perencanaan strategis pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
  3. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan
  4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan urusan umum bidang kependudukan
  5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kependudukan
  6. Pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang kependudukan
  7. Pelaksanaan standart pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan pada bidang kependudukan

8. Penyelenggara kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukan
10. Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan bidang administrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukan di lingkungan pemerintah daerah
11. Pembinaan kepada masyarakat tentang kependudukan
12. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan lembaga lainnya
13. Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal kebijakan kependudukan, tertib administrasi kependudukan dan analisis dampak kependudukan
14. Melaksanakan sistem informasi administrasi kependudukan
15. Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil pada data base kependudukan
16. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukan
17. Pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penyerasian perkembangan kependudukan.

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4		5	6
1	Meningkatnya angka kepemilikan dokumen	% kepemilikan KTP-EL dengan NIK tunggal melalui perekaman KTP-EL	Jml penduduk yg telah melakukan <u>perekaman data KTP-EL</u> Jml penduduk yg wajib perekaman data KTP-EL	X 100	Dispendukcapil	Bidang Adminduk
2	Meningkatnya pelayanan dokumen kependudukan	Jml Penerbitan KK	<u>Jml KK yg diterbitkan</u> Jlm Kepala Keluarga	X 100	Dispendukcapil	Bidang Adminduk
		Jml Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran	Jml Kutipan <u>Akte Kelahiran yg diterbitkan</u> Jml kelahiran yg terjadi	X 100	Dispendukcapil	Bidang Adminduk
		Jml Penerbitan Kutipan Akte Kematian	Jml Kutipan <u>Akte Kematian yg diterbitkan</u> Jml kematian yg terjadi	X 100	Dispendukcapil	Bidang Adminduk
3	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan	Hasil Survey IKM Pelayanan	Nilai IKM		Dispendukcapil	
4	Meningkatnya pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Hasil Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai Laporan capaian kinerja dan keuangan		Dispendukcapil	Subag. Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan

7. INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

VISI : Terwujudnya Sarana Prasarana Infrastruktur Wilayah yang memadai dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah

MISI :

1. Meningkatkan peran dan fungsi perencanaan dan pengawasan teknis infrastruktur kebinamargaan dan keciptakaryaan
2. Meningkatkan pengelolaan infrastruktur kebinamargaan yang optimal
3. Meningkatkan pengelolaan infrastruktur keciptakaryaan yang optimal
4. Meningkatkan koordinasi, sinergitas dan sinkronisasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan dalam pengelolaan infrastruktur kebinamargaan dan keciptakaryaan
5. Meningkatkan pelayanan kebinamargaan dan keciptakaryaan melalui pengembangan kapasitas SDM, Sarana Prasarana dan Mekanisme serta prosedurkelembagaan yang sistematis

TUGAS : Membantu Bupati di Bidang Pekerjaan Umum, melipti tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dalam merumuskan perencanaan kebijaksanaan , pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.

FUNGSI :

1. Penyusun anggaran untuk kegiatan rutin maupun pembangunan
2. Penyelenggaraan ketatausahaan meliputi tatausaha meliputi tatausaha umum, kepegawaian dan keuangan
3. Perencanaan pembagian pekerjaan dan penentu jadwal pekerjaan
4. Pelaksanaan bimbingan, pemberian petunjuk teknis kepada masyarakat mengenai kebijaksanaan pemerintah Kabupaten Magetan di bidang perencanaan kota,peruntukan suatu ruang atau kawasan

5. Pelaksanaan bimbingan dan pemberian petunjuk teknis kepada masyarakat dalam usaha pembangunan jalan, jembatan, gorong-gorong, gedung-gedung, penerangan jalan umum yang dilaksanakan secara swadaya kepada masyarakat
6. Pemberian rekomendasi dan atau pertimbangan permohonan ijin mendirikan bangunan gedung
7. Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan tugas pokoknya
8. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati

No	KINERJA UTAMA		Penjelasan	Sumber Data	Penanggung Jawab
	Kinerja Utama/ Sasaran Strrategis	Indikator Kinerja Utama			
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pelayanan perencanaan dan pengawasan teknis kebinamargaan dan keciptakaryaan	Prosentase jml dokumen perencanaan dan pengawasan teknis yang tersusun tepat waktu	Jml dok tersusun <u>tepat waktu</u> Dokumen rencana X 100	DPU BMCK	Bid. Sekretariat
2	Meningkatnya pengelolaan infrastruktur kebinamargaan yang optimal	Prosentase jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi di wilayah propinsi/kabupaten/kota	Panjang jalan yg menghubungkan pusat <u>produksi kondisi baik</u> Panjang seluruh jalan yg menghubungkan pusat produksi X 100	DPU BMCK	Bidang Binamarga
		Prosentase tingkat kondisi jalan kabupaten/kota kondisi baik	Panjang jalan aspal kab <u>dalam kondisi baik</u> Panjang seluruh jalan yang menghubungkan pusat produksi X 100	DPU BMCK	Bidang Binamarga

		Prosentase tingkat kondisi jembatan Kabupaten/Kota kondisi baik	Jembatan Kab. <u>Kondisi baik</u> Jembatan seluruh yg ada di jalan kabupaten	X 100	DPU BMCK	Bidang Binamarga
		Prosentase jalan kabupaten/kota yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas ( PSU )	Jalan kabupaten yang <u>dilengkapi PSU</u> Panjang seluruh jalan kabupaten	X 100	DPU BMCK	Bidang Binamarga
3	Meningkatnya pengelolaan infrastruktur keciptakarya yang optimal	Prosentase lingkungan sehat dan aman yang di dukung dengan prasarana sarana utilitas ( PSU )	Jml. Rumah Tangga <u>yg di dukung PSU</u> Jml seluruh rumah tangga di Kabupaten	X 100	DPU BMCK	Bidang Cipta Karya
		Prosentase ketersediaan rumah layak huni dan layanan rumah layak yang terjangkau	<u>Jml rumah layak huni</u> Jml seluruh rumah tangga di Kabupaten	X 100	DPU BMCK	Bidang Cipta Karya
		Prosentase tersedianya air baku unt.memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	Jml sumber <u>air baku yang ada</u> Jml sumber air baku yg di butuhkan	X 100	DPU BMCK	Bidang Ciptakarya
		Prosentase rumah tangga pengguna air bersih	Jml rumah tangga <u>pengguna air bersih</u> Jml seluruh RT	X 100	DPU BMCK	Bidang Cipta Karya
4	Meningkatnya keterpaduan pengelolaan infrastruktur kebinamargaan dan keciptakarya	Prosentase ketersediaan PJU	<u>Jml titik PJU yg ada</u> Jml titik lampu yang di butuhkan	X 100	DPU BMCK	Bidang PJU



		Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan	Jumlah sarana dan prasarana kebinamargaan ( alat berat ) yang ada di lingkup Dinas PU BMCK	DPU BMCK	Bidang PJU
5	Meningkatnya pelayanan kelembagaan berbasis dukungan SDM, sarana prasarana dan mekanisme serta prosedur kelembagaan yang sistematis	Prosentase masyarakat yang terlayani	$\frac{\text{Jml masyarakat yang terlayani}}{\text{Jml Penduduk di Kab. Magetan}} \times 100$	DPU BMCK	Bidang Sekretariat

8. Instansi : DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN

Visi : " Terwujudnya pendayagunaan sumber daya air yang proporsional sesuai dengan tingkat kebutuhan irigasi "

Misi :

1. Pengembangan potensi sumber daya air dalam rangka penyesuaian tuntutan kebutuhan air
2. Peningkatan efisiensi distribusi pembagian air pada masing - masing Jaringan Irigasi
3. Pendistribusian air secara proporsional dengan melibatkan peran serta masyarakat.
4. Perlindungan terhadap sarana dan prasarana pengairan serta daerah rawan bencana akibat daya rusak air

Tugas :

Perumusan perencanaan, kebijaksanaan, pelaksanaan pembangunan di bidang Pengairan, penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian teknis pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pengairan serta pengendalian sumber-sumber air serta peyelenggaraan kerja sama pengelolaan sumber-sumber air antar daerah/ perbatasan.

Fungsi :

1. Perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan bidang pengairan.
2. Penyelenggaraan pembangunan di bidang pengairan
3. Pemberian bimbingan dan perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati
4. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan prasarana pengairan serta kegiatan pemanfaatan, pemantauan dan pengendalian sumber-sumber air
5. Penyelenggaraan kerja sama antar daerah dalam pembangunan dan pengelolaan di bidang pengairan
6. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati

NO.	KINERJA UTAMA		PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Terlayannya kebutuhan air untuk irigasi</b>	Intensitas Tanam/Cropping Intensity (CI)	$CI = ((\text{Jumlah luas tanam pada MT I} + \text{MT II} + \text{MT III}) / (\text{Total luas baku sawah})) \times 100\%$ <i>MT = Musim Tanam</i> <i>Baku Sawah = Sawah beririgasi Teknis</i>	Laporan Rencana & Realisasi Tanaman	Bidang PPA & 6 UPTD
<b>2</b>	<b>Terwujudnya Jaringan Irigasi kondisi baik</b>	Prosentase Panjang Saluran Kondisi Baik	$\% \text{ Panjang Sal. kondisi Baik} = ((\text{Panjang Sal. Kondisi Baik} / \text{Total Panjang Panjang Saluran}) \times 100\%$	Laporan Inventarisasi Kondisi Existing Saluran Laporan Inventarisasi Kondisi Existing Dam	Bidang I & D
		Prosentase Dam Kondisi Baik	$\% \text{ Dam Kondisi Baik} = ((\text{Jumlah Dam kondisi baik} / \text{Jumlah Dam Total})) \times 100\%$		Bidang PWESRAT
<b>3</b>	<b>Peningkatan ketersediaan air</b>	Prosentase Jaringan Irigasi rawan bencana  Rasio Pembangunan Sumur Air Tanah Dalam	$\% \text{ Jaringan Irigasi rawan bencana} = ((\text{Panjang Jaringan Irigasi rawan bencana} / \text{Panjang Total Jaringan Irigasi})) \times 100\%$ $\text{Jumlah Pembangunan SATD di Tahun } (n) : \text{Tahun } (n - 1)$ <i>SATD = Sumur Air Tanah Dalam</i> <i>n = tahun berjalan</i> <i>(n - 1) = tahun sebelumnya</i>	Laporan Inventarisasi Jaringan Irigasi rawan bencana Laporan Inventarisasi SATD	Bidang PDRAK  Bidang PWESRAT

9. SKPD : DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

VISI : TERWUJUDNYA SISTEM TRANSPORTASI YANG BERKUALITAS SERTA PENDAYAGUNAAN  
TEHNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SECARA BAIK DAN BENAR UNTUK Mendukung  
Masyarakat yang maju dan sejahtera.

MISI :

1. Meningkatkan pelayanan dan kemampuan Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang berkualitas ;
2. Menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib, aman dan lancar dalam mendukung sistem transportasi yang mantap;
3. Meningkatkan pelayanan angkutan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan mobilitas penduduk ;
4. Meningkatkan kapasitas layanan informasi dan komunikasi dalam upaya pemberdayaan potensi masyarakat serta mengembangkan layanan telekomunikasi dalam rangka membuka isolasi komunikasi bagi masyarakat pedesaan.

TUGAS : Melaksanakan koordinasi dalam merumuskan perencanaan kebijakan di bidang perhubungan, telekomunikasi dan informasi dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah.

FUNGSI :

1. Perencanaan yaitu segala usaha dan kegiatan dan pengumpulan, pengolahan, penilaian dan penyusunan kebijaksanaan teknis serta kebijaksanaan Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
2. Pelaksanaan yaitu usaha dan kegiatan untuk melaksanakan perencanaan program dan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan.
3. Pembinaan yaitu segala usaha dan kegiatan penyuluhan dan bimbingan kearah peningkatan perhubungan, telekomunikasi dan informatika;
4. Pengawasan yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan dan pelaksanaan tugas pokok sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
5. Penatausahaan yaitu segala usaha dan kegiatan yang mempunyai urusan umum,Kepegawaian dan Keuangan;
6. Pemberian perijinan tentang Perhubungan,Telekomunikasi dan Informatika sesuai kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok sesuai kebijaksanaan oleh Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
8. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

NO	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya pelayanan dan kinerja sumberdaya aparatur Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika	Skor Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dishubkominfo	Nilai IKM	Sekretariat	Dishubkom info
2	Meningkatnya ketertiban, keamanan, kelancaran pengguna jalan	Prosentase tersedianya rambu-rambu lalu lintas dan marka Jalan	$\frac{\sum \text{rambu-rambu yang terpasang}}{\sum \text{rambu-rambu yang dibutuhkan}} \times 100\%$ $\frac{\sum \text{Marka jalan yang tersedia}}{\sum \text{Marka jalan yang dibutuhkan}} \times 100\%$	Bidang Lalu Lintas	Dishubkom info
3	Terselenggaranya pelayanan angkutan umum	Ratio Load Factor  Prosentase Angkutan Umum yang diuji KIR	$\frac{\sum \text{Penumpang yang terangkut}}{\sum \text{Kapasitas tempat duduk penumpang}}$ $\frac{\sum \text{Kendaraan yang uji KIR}}{\sum \text{Kendaraan wajib uji KIR}} \times 100\%$	Bidang Angkutan dan Bidang Sarana dan Prasarana	Dishubkom info

		<p>Prosentase tersedianya terminal angkutan penumpang yang melayani angkutan umum dalam trayek</p> $\frac{\sum \text{Terminal angkutan penumpang yang ada}}{\sum \text{Kebutuhan Terminal angkutan penumpang}} \times 100\%$		
		<p>Prosentase tersedianya halte yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek</p> $\frac{\sum \text{Halte yang tersedia}}{\sum \text{Kebutuhan halte}} \times 100\%$		
4	Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan informasi	<p>Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan</p> $\frac{\sum \text{Kecamatan yang memiliki KIM}}{\sum \text{Kecamatan di Kabupaten}} \times 100\%$	<p>Jumlah distribusi informasi melalui media</p> <p>Jumlah informasi yang tersebar melalui media</p>	<p>Bidang Komunikasi dan Informatika</p>
		<p>Prosentase Menara yang berijin</p> $\frac{\sum \text{Menara yang mempunyai ijin}}{\sum \text{Menara yang ada}} \times 100\%$		<p>Dishubkom info</p>

10. Instansi : DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. MAGETAN.

Visi : ” Terwujudnya Pengelolaan Kehutanan dan Perkebunan Lestari Serta pengembangan agribisnis untuk Kesejahteraan Masyarakat.”

Misi : Meningkatkan kelestarian hutan dan perkebunan serta peningkatan prodduktivitas, mutu produk untuk kesejahteraan masyarakat.

Tugas : Memimpin, merumuskan kebijakan, melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dibidang kehutanan dan perkebunan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam rangka penyusunan rencana kegiatan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kehutanan
- c. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka pembinaan dan bimbingan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan
- d. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan bimbingan teknis dibidang kehutanan dan perkebunan
- e. Pelaksanaan pemberian ijin kegiatan di bidang kehutanan dan perkebunan
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang kehutanan dan perkebunan
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kehutanan dan perkebunan
- h. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas
- i. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1. Peningkatan rehabilitasi, konservasi dan perlindungan untuk kelestarian fungsi kehutanan dan pekebunan.	Prosentase penurunan lahan kritis diluar kawasan hutan.	$\frac{\text{Jml lhn kritis yg ditanganix}}{\text{Jml. total lahan kritis}} \times 100\%$	Data lahan desa , laporan petugas dan BP DAS, Citra Satelit	Dishutbun
2. Peningkatan Pembangunan kehutanan dan perkebunan berdaya dihulu, kuat dihilir dan berwawasan lingkungan serta berkelanjutan.	Prosentase peningkatan produksi dan produktivitas.	Rasio peningkatan produktitas per hektar. $\frac{\text{Jumlah produksi x 100 \%}}{\text{Luas areal}}$	Data produksi, Penyuluh kehutanan.	Dishutbun



11. Instansi : Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan

Visi : “Terwujudnya peternakan dan perikanan berbasis agribisnis untuk mencapai masyarakat yang sejahtera”

Misi :

- a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Peternakan dan Perikanan yang berwawasan agribisnis .
- b. Mengembangkan kelembagaan usaha Peternakan dan Perikanan yang produktif.
- c. Menumbuhkembangkan produk unggulan Peternakan dan Perikanan yang berdaya saing tinggi
- d. Mengembangkan teknologi tepat guna peternakan dan perikanan untuk menciptakan lapangan kerja yang produktif
- e. Mewujudkan tata niaga produk peternakan dan perikanan yang terarah dan rapi
- f. Menyediakan sarana prasarana peternakan dan Perikanan bagi aparaturnya maupun pelaku usaha peternakan dan perikanan
- g. Melestarikan potensi dan menggali sumber daya Peternakan Perikanan secara optimal

Tugas : Memimpin, melaksanakan koordinasi dalam merumuskan kebijakan, pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan peternakan dan perikanan

Fungsi :

- a. penyusunan perencanaan dalam pembangunan di bidang peternakan dan perikanan;
- b. pelaksanaan pembinaan umum dibidang peternakan dan perikanan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan dan perikanan;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang peternakan dan perikanan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemampuan peningkatan populasi ternak, produksi peternakan dan perikanan serta pendapatan masyarakat dari bidang peternakan dan perikanan;

- f. pelaksanaan pembinaan usaha dan pemberian rekomendasi ijin usaha dibidang peternakan dan perikanan sesuai dengan tugasnya;
- g. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi tepat guna;
- h. pelaksanaan pengamanan ternak dan ikan sesuai dengan tugasnya;
- i. pelaksanaan bimbingan, pengaturan, penyebaran, pengembangan dan pengawasan komoditas peternakan dan perikanan;
- j. pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- k. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

No.	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
a.	Meningkatnya populasi dan produksi ternak dan ikan	Jumlah populasi ternak 1. Sapi potong 2. Sapi perah 3. Kerbau 4. Kuda 5. Kambing 6. Domba 7. Babi 8. Ayam Buras 9. Ayam Ras Petelur 10. Ayam Ras Pedaging 11. Itik 12. Entok	Jumlah populasi masing-masing jenis ternak selama tahun tertentu dalam satuan ekor	Dinas Peternakan dan Perikanan	

		Jumlah produksi hasil ternak 1. Daging 2. Telur 3. Susu	Jumlah produksi hasil ternak selama tahun tertentu dalam satuan ton	Dinas Peternakan dan Perikanan	
		Jumlah produksi perikanan tangkap (ton)	Jumlah produksi perikanan tangkap dari 18 Kecamatan di Kabupaten Magetan	Dinas Peternakan dan Perikanan	
		Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)	Jumlah produksi perikanan budidaya dari 18 Kecamatan di Kabupaten Magetan	Dinas Peternakan dan Perikanan	
b.	Meningkatkan kemandirian kelembagaan Usaha Peternakan dan Perikanan	Jumlah kelompok peternak dan pembudidaya ikan yang mengalami peningkatan kelas kelompok	Jumlah kelompok peternak dan pembudidaya ikan yang mengalami peningkatan kelas kelompok dalam tahun tertentu	Dinas Peternakan dan Perikanan	
c.	Meningkatkan jaminan keamanan pangan asal hewan dan ikan yang aman sehat utuh dan halal serta meningkatkan Konsumsi Protein Hewani	Jumlah ternak yang dipotong di bawah pengawasan Dinas Peternakan dan Perikanan	Jumlah ternak yang dipotong di bawah pengawasan Dinas Peternakan dan Perikanan dalam tahun tertentu	Dinas Peternakan dan Perikanan	

		Konsumsi ikan (kg/kap/th)	<u>Jumlah Produksi Ikan</u> Jumlah Penduduk Kab. Magetan	Dinas Peternakan dan Perikanan	
d.	Meningkatkan dan mempertahankan status Kesehatan Hewan dan ikan	Angka Derajat kesehatan hewan	Jumlah cakupan ternak yang tervaksinasi dan terlayani kesehatan ternaknya	Dinas Peternakan dan Perikanan	
e.	Meningkatkan Kelestarian Sumber Daya Peternakan dan Perikanan	Jumlah embung/telaga/waduk tempat penyebaran ikan	Jumlah embung/telaga/waduk tempat penyebaran ikan dalam tahun tertentu	Dinas Peternakan dan Perikanan	

12. Instansi : Dinas Pertanian Kabupaten Magetan

Visi : “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Usaha Tani Yang Berorientasi Agribisnis”

Misi :

- a. Meningkatkan Produksi Pertanian
- b. Meningkatkan Pendapatan Petani

Tugas :

1. Memimpin, melaksanakan koordinasi dalam merumuskan perencanaan kebijakan , pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pertanian
2. Melaksanakan administrasi, koordinasi, perencanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga
3. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi di bidang sarana dan prasarana dan perlindungan tanaman
4. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi di bidang peningkatan dan pengembangan produksi tanaman pangan
5. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi di bidang peningkatan dan pengembangan produksi hortikultura dan aneka tanaman
6. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi di bidang permodalan, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
7. Melaksanakan sebagian tugas dan dibentuk sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan dalam kabupaten

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana dan perlindungan tanaman
- b. Pelaksanakan kebijakan bidang peningkatan dan pengembangan sarana prasarana dan perlindungan tanaman
- c. Penyiapan bahan rancangan kebijakan umum di bidang peningkatan dan pengembangan sarana prasarana dan perlindungan tanaman
- d. Pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang peningkatan dan pengembangan sarana prasarana dan perlindungan tanaman
- e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan produksi tanaman pangan dan aneka tanaman
- f. Pelaksanakan kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan produksi tanaman pangan dan aneka tanaman
- g. Penyiapan bahan rancangan kebijakan umum di bidang peningkatan dan pengembangan produksi tanaman pangan dan aneka tanaman
- h. Pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang peningkatan dan pengembangan produksi tanaman pangan dan aneka tanaman
- i. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan produksi tanaman hortikultura dan aneka tanaman
- j. Pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan dan pengembangan produksi tanaman hortikultura dan aneka tanaman
- k. Penyiapan bahan rancangan kebijakan umum di bidang peningkatan dan pengembangan produksi tanaman hortikultura dan aneka tanaman

- l. Pembinaan teknis monitoring dan evaluasi di bidang peningkatan dan pengembangan produksi tanaman hortikultura dan aneka tanaman
- m. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
- n. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
- o. Penyiapan bahan rancangan kebijakan umum di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
- p. Pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian

No.	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB	KET
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Lokal dengan Memperhatikan Kebijakan Ekonomi Regional, Nasional dan Global	Capaian Binaan Gabungan Kelompok Tani	Jumlah Gabungan Kelompok Tani	Dinas Pertanian	
		Produktifitas Tanaman Pangan Padi, Jagung, Kedelai ( Ton/ha )	Produksi per ha/Luas Panen	Dinas Pertanian	
		Promosi Hasil Produk Pertanian/Perkebunan	Jumlah Kegiatan Promosi	Dinas Pertanian	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian / Perkebunan(Indeks Pertanaman )	Perbandingan Total Lahan Pertanian Dengan Luas Lahan Ditanami	Dinas Pertanian	

		Produksi Pertanian ( buah dan sayur )	Produksi per ha dikali Laus Panen Keseluruhan	Dinas Pertanian	
		Kelas Kelompok Tani	Kelengkapan Administrasi Kelompok	Dinas Pertanian	



13. Instansi : DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

Visi : Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Yang Optimal Guna Menunjang Pembangunan Magetan Yang Adil dan Bermartabat

Misi : a. Optimalisasi Pendapatan Daerah Sesuai Dengan Potensi Yang Dimiliki  
b. Mewujudkan Pelayanan Pendapatan Daerah Yang Efektif dan Efisien

Tugas : Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Serta Penyelenggaraan Urusan Pemerintah dan Pelayanan Umum Di Bidang Pendapatan Daerah

Fungsi :

- a) Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah
- c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah
- d) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang pendapatan daerah
- e) Pelaksanaan program, pembinaan umum, dan perumusan kebijakan teknis dalam peningkatan pendapatan daerah
- f) Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian dan pelaksanaan tugas dinas
- g) Penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor
- h) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang pendapatan daerah
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

NO.	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPEARASIONAL & FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB	KET
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	2	3	4	5	6
1	Peningkatan Penerimaan PAD	1. Persentase kenaikan penerimaan PAD  2. Persentase Ranperda yang disahkan menjadi Perda	$\frac{\text{Realisasi th berjalan} - \text{Realisasi tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi tahun sebelumnya}} \times 100$ $\frac{\text{Piut. th sblmmnya} - \text{piut. th berjalan}}{\text{Piutang th sebelumnya}} \times 100$	Dinas Pendapatan Daerah Kab. Magetan	

14. Instansi : DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Visi : Memantapkan Magetan sebagai kota wisata dan seni budaya yang di dukung oleh pemuda yang berprestasi khususnya di bidang olah raga dengan sarana prasarana semakin memadai dan menjadi destinasi wisata unggulan di tahun 2018

Misi :

1. Mengembangkan sumberdaya manusia dan kelembagaan, kepariwisataan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga yang profesional, berkarakteristik budaya magetan yang ramah, lemah lembut dan sopan santun demi memajukan kepariwisataan, kebudayaan, pemuda dan olah raga kabupaten magetan yang berwawasan global
2. Membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana untuk mewujudkan magetan kota wisata, kota budaya, dan kota bagi pemuda berprestasi, khususnya di bidang olah raga, yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan berpedoman kepada rencana tata ruang yang ada
3. Meningkatkan pelestarian, pemberdayaan, pengembangan kepariwisataan, kebudayaan dan kesenian serta pemuda dan olah raga agar lebih berprestasi dan berdaya saing tinggi
4. Meningkatkan destinasi pariwisata yang berdaya saing tinggi baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional
5. Meningkatkan pemasaran dan promosi melalui kemitraan dan kerjasama pariwisata, kebudayaan pemuda dan olah raga dengan pemangku kepentingan dan /atau Kabupaten / Kota atau negara lain.

Tugas : Memimpin, melaksanakan koordinasi dalam merumuskan perencanaan kebijaksanaan di bidang Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Fungsi :

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
2. Perumusan kebijakan, pembinaan dan pengawasan dalam rangka pengembangan bidang pariwisata;
3. Pengelolaan, penelitian, pendokumentasian dan pemeliharaan berbagai bentuk seni dan budaya daerah;
4. Peningkatan dsan pengembangan aspirasi seni budaya dan menilai mutu seni dan budaya masyarakat;
5. Penyelenggaraan dan pembinaan olahraga, seni dan budaya serta kerja sama dengan instansi terkait;
6. Penyusunan program penyediaan sarana, inventarisasi dan pemeliharaan serta pengawasan penggunaan

- sarana seni dan budaya;
7. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
  8. Pemberian perijinan yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengembangan di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. Penetapan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan program di bidang pariwisata, kebudayaan, pemuda dan olahraga; dan
  10. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1. Meningkatkan jumlah pengunjung tempat wisata	Persentase peningkatan jumlah pengunjung tempat wisata	Selisih jml pengunjung tmp wisata tahun 2013 dan 2014 $\frac{\text{Jumlah pengunjung tempat wisata tahun 2014} - \text{Jumlah pengunjung tempat wisata tahun 2013}}{\text{Jumlah pengunjung tempat wisata tahun 2013}} \times 100 \%$	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
	Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	Selisih jumlah atraksi wisata tahun 2013 dan tahun 2014 $\frac{\text{Jumlah atraksi wisata tahun 2014} - \text{Jumlah atraksi wisata tahun 2013}}{\text{Jumlah atraksi wisata tahun 2013}} \times 100 \%$	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
	Persentase peningkatan promosi wisata	Selisih jumlah promosi wisata tahun 2013 dan tahun 2014 $\frac{\text{Jumlah promosi wisata tahun 2014} - \text{Jumlah promosi wisata tahun 2013}}{\text{Jumlah promosi wisata tahun 2013}} \times 100 \%$	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
	Persentase peningkatan kualitas SDM di bidang kepariwisataan	Selisih jumlah pelaku wisata yang dilatih tahun 2013 dan tahun 2014 $\frac{\text{Jumlah pelaku wisata yang dilatih tahun 2014} - \text{Jumlah pelaku wisata yang dilatih tahun 2013}}{\text{Jumlah pelaku wisata yang dilatih tahun 2013}} \times 100 \%$	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
	Persentase peningkatan jumlah akomodasi pariwisata	Selisih jumlah akomodasi tahun 2013 dan tahun 2014 $\frac{\text{Jumlah akomodasi tahun 2014} - \text{Jumlah akomodasi tahun 2013}}{\text{Jumlah akomodasi tahun 2013}} \times 100 \%$	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata

	Persentase peningkatan jumlah calon duta wisata Bagus Dyah Kab. Magetan	Selisih jml calon duta wisata Bagus Dyah Kab. Magetan tahun 2013 dan tahun 2014 Jumlah calon duta wisata Bagus Dyah Kab. Magetan tahun 2013	x 100 %	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata
2.Meningkatkan jumlah atraksi seni budaya	Persentase peningkatan jumlah atraksi seni budaya	Selisih jumlah atraksi seni budaya tahun 2013 dan 2014 Jml atraksi seni budaya th 2013	x 100 %	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Kebudayaan
Meningkatkan pemeliharaan Benda Cagar Budaya , sejarah, museum dan kepurbakalaan	Persentase jumlah BCB, sejarah Museum dan kepurbakalaan yang dipelihara.	Selisih jml BCB yg dipelihara tahun 2013 dan tahun 2014 Jml BCB di Magetan th 2013	x 100 %	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Kebudayaan
Pemenuhan kebutuhan Juru Pelihara BCB	Persentase jumlah Juru Pelihara BCB	Selisih jumlah Juru Pelihara BCB th 2013 dan th 2014 Jumlah kebutuhan ideal Juru Pelihara BCB tahun 2013	x 100 %	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Kebudayaan
Terwujudnya museum dan taman budaya daerah	Persentase progres kemajuan rintisan museum dan taman budaya	Selisih prosentase progres Rintisan museum di Kab. Magetan tahun 2013 dan 2014 Prosentase progress rintisan museum tahun 2013	x 100 %	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Kebudayaan
Peningkatan festival seni budaya daerah	Persentase jumlah festival seni budaya daerah .	Selisih jml festival seni budaya daerah th 2014 dan 2013 Jumlah festival seni budaya tahun 2013	x 100 %	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Kebudayaan
5.Meningkatnya Pemuda Pelopor yang berprestasi	- Persentase Pemuda Pelopor Tingkat Kab. Magetan	Jumlah pemuda Pelopor Berprestasi Jumlah Pemuda Pelopor yang dikirim	x 100 %	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Pemuda dan Olah Raga
6.Meningkatnya Paskibraka Terseleksi	Prosentase Paskibraka Tk. Kabupaten Magetan	Jumlah Paskibraka Terseleksi Tk. Kab. Magetan Jml Paskibraka Kab. Magetan	x 100 %	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Pemuda dan Olah Raga

7.Meningkatnya Paskibraka Terseleksi	Prosentase Paskibraka Tk. Prop Jatim	Jumlah Paskibraka <u>Terseleksi Tk. Prop. Jatim</u> Jumlah Paskibraka Tk. Prop jatim	x 100 %	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Pemuda dan Olah Raga
8.Meningkatkan jumlah Pembina Paskibraka yang terlatih.	- Persentase Pembina Paskibraka yang terlatih.	Jml Pembina <u>Paskibraka yang terlatih.</u> Jumlah Pembina Paskibraka di Kab Magetan	x 100 %	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Pemuda dan Olah Raga
9.Meningkatnya Prestasi Atlit Olah Raga di tingkat Daerah	Persentase Club Atlit Olah Raga 13 cabang Olah Raga	Jml Atlit Olah Raga 13 cabang <u>Olah Raga Prestasi di Daerah</u> Jumlah Atlit Olah raga	x 100 %	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Pemuda dan Olah Raga
10.Meningkatnya kesegaran jasmani bagi masyarakat	- Persentase masyarakat Kabupaten Magetan	Jml masyarakat <u>Magetan yg ingin sehat jasmani</u> Jumlah Masyarakat Magetan	x 100 %	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Pemuda dan Olah Raga
11.Terwujudnya atlit yang potensial dan berprestasi	- Persentase atlit yang potensial dan berprestasi	Jumlah atlit <u>yang potensial dan berprestasi</u> Jumlah atlit olah raga	x 100 %	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Pemuda dan Olah Raga
12.Meningkatnya masyarakat yang gemar olah raga rekreasi	- Persentase masyarakat yang gemar olah raga rekreasi	Jumlah masyarakat yang <u>gemar olah raga rekreasi</u> Jumlah masyarakat Magetan	x 100 %	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Pemuda dan Olah Raga
13.Meningkatnya Prestasi Atlit olah raga tenis Meja di Magetan	- Persentase Atlit Tenis Meja di Kab. Magetan	Jumlah atlit olah raga <u>tenis meja berprestasi</u> Jml atlit olah raga tenis meja	x 100 %	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Pemuda dan Olah Raga
14.Pembinaan dan pengiriman Parade Surya Senja	- Persentase siswa/siswi yang gemar Drum Band	Jumlah siswa siswi <u>yang gemar drum band</u> Jumlah siswa siswi	x 100 %	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Pemuda dan Olah Raga
15. Meningkatkan fasilitas pelayanan terhadap masyarakat	- Persentase fasilitas pelayanan terhadap masyarakat	<u>Jumlah fasilitas pelayanan</u> Jumlah pengunjung sarpras OR ( GOR Ki Mageti )	x 100 %	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Pemuda dan Olah Raga

16.Meningkatnya GOR Ki Mageti yang baik dan nyaman.	- Presentase GOR Ki Mageti yang nyaman	$\frac{\text{Jumlah sarpras olah raga}}{\text{Jumlah masyarakat Kabupaten Magetan}} \times 100 \%$	DISPARBUDPOR A KAB. MAGETAN	Bidang Pemuda dan Olah Raga
---	--	--	-----------------------------------	-----------------------------

15. Instansi : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

Visi : Terwujudnya Pelayanan Administrasi Yang Prima dengan SDM aparatur yang profesional Bagi peningkatan Kinerja DPRD

Misi :

- a. Mewujudkan pelayanan administrasi, sarana prasarana dan prosedur keuangan yang efektif dalam rangka menunjang kinerja DPRD
- c. Mengembangkan dan meningkatkan SDM yang profesional dalam upaya memperkuat dukungan analisa dan kajian dalam pengambilan kebijakan DPRD
- d. Mempercepat proses penyampaian aspirasi masyarakat di DPRD dalam rangka menegakkan kaidah demokrasi

Tujuan :

- a. Terwujudnya pelayanan administrasi, sarana prasarana dan prosedur keuangan yang berkualitas
- b. Terwujudnya profesionalisme SDM aparatur dalam memberikan pelayanan prima bagi DPRD
- c. Terwujudnya kinerja DPRD yang responsif

Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD; menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD; mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

Fungsi : Pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan urusan dalam ; pengelolaan administrasi keuangan DPRD ; fasilitasi pelaksanaan persidangan DPRD ; fasilitasi penyusunan perundang-undangan DPRD ; fasilitasi dan koordinasi tenaga ahli.



NO.	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPEARASIONAL & FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB	KET
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	2	3	4	5	6
1	Terciptanya produk kebijakan pemerintah yang akuntabel	1. Persentase ketepatan waktu pengesahan APBD 2. Persentase Ranperda yang disahkan menjadi Perda 3. Persentase Ranperda yang berasal dari hak inisiatif DPRD yang disahkan menjadi Perda 4. Persentase pembahasan Perda yang telah dinotulen 5. Persentase pelaksanaan rapat yang menghasilkan keputusan	APBD Pokok dan APBD $\frac{\text{Perubahan ditetapkan tepat waktu}}{2} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Perda yang disahkan}}{\text{Jumlah perda yang diusulkan}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Perda hak inisiatif DPRD}}{\text{Jumlah perda yang terbit}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah perda yang dinotulenkan}}{\text{Jumlah Perda yang diusulkan}} \times 100$ $\frac{\text{Jml rapat yg menghasilkan keputusan}}{\text{Jumlah rapat}} \times 100$	Sekretariat DPRD Kab. Magetan	
2	Terdukungnya peningkatan kinerja DPRD	1. Rasio jumlah staf Dapil yang memberikan layanan selama berlangsungnya reses 3 kali 6 hari	$\frac{\text{Jumlah staf Dapil}}{\text{Frekuensi reses}}$	Sekretariat DPRD Kab. Magetan  Sekretariat DPRD Kab. Magetan	

		2. Persentase pengaduan masyarakat yang ditanggapi	$\frac{\text{Frekuensi pengaduan masyarakat yg telah dijawab}}{\text{Frekuensi pengaduan masyarakat melalui surat}} \times 100$		
3	Tersedianya media cetak & elektronik peningkatan kualitas pelayanan ke pada DPRD	<p>1. Rasio jumlah berita kegiatan dewan dalam media website yang menjadi konsumsi masyarakat</p> <p>2. Rasio jumlah staf AKD dan Fraksi yang memberikan manfaat layanan kepada AKD dan Fraksi</p> <p>3. Rasio jumlah staf AKD dan Fraksi yang memberikan manfaat layanan kepada AKD dan Fraksi</p>	$\frac{\text{Frekuensi berita website}}{\text{Frekuensi kunjungan kerja dewan}}$ $\frac{\text{Jumlah berita media cetak}}{\text{Frekuensi kegiatan Alat Kelengkapan Dewan}}$ $\frac{\text{Jumlah staf yang memberikan layanan kepada AKD dan Fraksi}}{\text{Jumlah AKD dan Fraksi yang memperoleh manfaat layanan staf}}$	<p>Sekretariat DPRD Kab. Magetan</p> <p>Sekretariat DPRD Kab. Magetan</p> <p>Sekretariat DPRD Kab. Magetan</p>	

16. INSTANSI : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

VISI : Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, berkualitas, dan akuntabel

MISI : 1. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur perencana pembangunan daerah  
2. Meningkatkan kualitas data dan informasi  
3. Menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, tepat, akurat, partisipatif, akomodatif dan akuntabel

TUGAS : Membantu Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan rakyat, pemukiman dan prasarana wilayah serta tugas-tugas penelitian pengembangan, pengelolaan data elektronik, pengembangan investasi daerah dan pengembangan badan usaha milik daerah

FUNGSI : 1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah  
2. Penyusunan Program Kegiatan di Bidang Data dan Statistik, Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik Prasarana dan Penanaman Modal  
3. Pengkoordinasian Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
4. Pengelolaan Administrasi Umum, meliputi Ketatalaksanaan, Keuangan, Kepegawaian, Perlengkapan dan Peralatan.

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya profesionalisme aparatur perencanaan pembangunan	Jumlah aparatur Bappeda dan perencanaan pembangunan SKPD yang mendapatkan diklat perencanaan dan teknis fungsional lainnya	perwakilan dari Bappeda dan 2 orang dari setiap SKPD	Sekretaris	Sekretariat
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur Bappeda	Hasil survey IKM oleh lembaga independent	Kabid. Litbang dan PDE	Bidang Litbang dan PDE
Tersedianya sarana prasarana kebutuhan perencanaan pembangunan yang memadai	% ketersediaan sarana dan prasarana bagi aparatur perencanaan pembangunan	$\frac{\text{jumlah sarpras yg tersedia}}{\text{jumlah sarpras yg dibutuhkan}} \times 100\%$	Sekretaris	Sekretariat
Tersedianya data dan informasi yang kredibel untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah dokumen data statistik kabupaten	Buku Kabupaten Magetan dalam Angka dan buku PDRB Kabupaten Magetan	Kabid. Pemerintahan	Bidang Pemerintahan
	Jumlah dokumen data statistik kecamatan	buku kecamatan dalam angka	Kabid. Pemerintahan	Bidang Pemerintahan
	% keterisian database perencanaan dan pembangunan daerah	$\frac{\text{jumlah data yang tersedia}}{\text{jumlah data yg dibutuhkan}} \times 100\%$	Kabid. Litbang & PDE	Bidang Litbang dan PDE
Terwujudnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi	Prosentase integrasi sistem informasi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaporan	Integrasi musrenbang kecamatan, renja SKPD, RKPD, KUA-PPAS, RKA, RAPBD, DPA, Pelaporan	Kabid. Pemerintahan	Bidang Pemerintahan

Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan pembangunan sektoral yang terarah, terukur dan akuntabel	Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tepat waktu	Diserahkan nya Raperda RPJMD Tahun 2018-2023 paling lambat 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik	Kabid. Pemerintahan	Bidang Pemerintahan
		Ditetapkannya Perbup RKPD paling lambat akhir bulan Mei	Kabid. Pemerintahan	Bidang Pemerintahan
		Diserahkan nya KUA-PPAS paling lambat minggu ke-2 Bualn Juni	Kabid. Pemerintahan	Bidang Pemerintahan
		Ditetapkannya Perbup RKPD P paling lambat minggu ke-2 Bulan Juli	Kabid. Pemerintahan	Bidang Pemerintahan
		Diserahkan nya KUA-PPAS P paling lambat minggu ke-1 Bulan Agustus	Kabid. Pemerintahan	Bidang Pemerintahan
		Ditetapkannya SK Bupati tentang Rancangan Akhir Renstra SKPD paling lambat 1 bulan setelah Perda RPJMD disahkan	Kabid. Pemerintahan	Bidang Pemerintahan
		Ditetapkannya SK Bupati tentang Rancangan Renja SKPD paling lambat 2 minggu setelah Perbup RKPD ditetapkan	Kabid. Pemerintahan	Bidang Pemerintahan
Jumlah dokumen monev dan laporan capaian kinerja pembangunan daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Tata Ruang	Dokumen LKPJ Akhir masa jabatan KDH, LKPJ Tahunan, capaian target kinerja RKPD	Kabid. Pemerintahan	Bidang Pemerintahan
		Dokumen RDTRK Perkotaan dan Peta RDTRK Perkotaan	Kabid. Kimpraswil	Bidang Kimpraswil

	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan Kimpraswil	Dokumen PPSP, LP2B, , KLHS, UKL/UPL, Amdal, FS, NSPM	Kabid. Kimpraswil	Bidang Kimpraswil
		Dokumen RIPPARDA	Kabid. Ekonomi dan Pembangunan	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
	Jumlah dokumen monev pelaksanaan pembangunan kimpraswil	Laporan DAK, Data RTLH, capaian kinerja bidang kimpraswil.	Kabid. Kimpraswil	Bidang Kimpraswil
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	Masterplan pembangunan ekonomi, masterplan pengembangan kawasan agropolitan	Kabid. Ekonomi dan Pembangunan	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
		Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Kabid. Kesra	Bidang Kesra
	Jumlah dokumen monev pelaksanaan pembangunan ekonomi	Dokumen Monev RADPG, SKPG, Inflasi	Kabid. Ekonomi dan Pembangunan	Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Dokumen LP2KD		Kabid. Kesra	Bidang Kesra	
	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan Investasi	Dokumen perencanaan pembangunan investasi	Kabid. Investasi dan BUMD	Bidang Investasi dan BUMD
	Jumlah dokumen monev realisasi investasi	Dokumen realisasi investasi	Kabid. Investasi dan BUMD	Bidang Investasi dan BUMD
	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya	Masterplan pemb., pendidikan, masterplan pembangunan kesehatan, RAD MDG's	Kabid. Kesra	Bidang Kesra

	Jumlah dokumen monev pelaksanaan pembangunan sosial budaya	Monev MDG's, monev sosbud, monev kegiatan bersumber dari pajak rokok	Kabid. Kesra	Bidang Kesra
--	--	--	--------------	--------------

17. Instansi : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN  
MAGETAN
- Visi : Tersedia Aparatur Yang Profesional, Sejahtera dan Bermartabat
- Misi :
  1. Menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dalam bidang-bidang substantif pemerintah
  2. Mengembangkan koordinasi dan kerja sama aparatur dalam penyiapan sumber daya aparatur.
  3. Memantapkan pembinaan karier aparatur Pemerintah.
  4. Memantapkan Sistem Informasi Kepegawaian sebagai sumber informasi kebijaksanaan kepegawaian.
  5. Memantapkan Sistem Administrasi Kepegawaian guna meningkatkan kesejahteraan aparatur.
  6. Berperan aktif dalam menumbuhkembangkan nilai-nilai pemerintahan yang baik.
- Tugas : Membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan Manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah Magetan yang meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, larangan, sanksi dan penghargaan dan pensiun
- Fungsi :
  1. Penyiapan penyusunan dan menghimpun peraturan daerah dibidang kepegawaian sesuai dengan norma standar dan prosedur yang ditetapkan pemerintah.
  2. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah.
  3. Penyiapan kebijaksanaan teknis pengembangan kepegawaian daerah.
  4. Pengidentifikasian kebutuhan diklat, pelaksanaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian serta pemanfaatan diklat sumber daya manusia.
  5. Penyiapan pelaksanaan pengadaan pengangkatan kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian PNS Daerah sesuai dengan norma dan standart serta prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  6. Pelayanan administrasi kepegawaian dan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional sesuai peraturan yang telah ditetapkan.



7. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
8. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
9. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil.
10. Penyiapan pelaksanaan pengadaan pengangkatan kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian PNS Daerah sesuai dengan norma dan standart serta Pengelolaan sistim informasi kepegawaian daerah
11. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan
  - . Kepegawaian Negara.

<b>KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>DEVINISI OPERASIONAL &amp; FORMULA PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBERDATA / PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>KET.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1. Meningkatkan kualitas SDM Aparatur	1. Prosentase CPNS yang mengikuti pembekalan	$\frac{\text{Jumlah CPNS yg lulus pembekalan}}{\text{Jumlah CPNS peserta pembekalan}} \times 100\%$	Bidang Pengembangan	BKD Kab. Magetan
	2. Prosentase peserta yang lulus ujian dinas/ penyesuaian	$\frac{\text{Jumlah peserta ujian dinas yg lulus}}{\text{Jumlah peserta ujian dinas}} \times 100\%$	Bidang Pengembangan	BKD Kab. Magetan
	3. Prosentase PNS yang mengikuti diklat teknis dan fungsional	$\frac{\text{Jml PNS yg ikut diklat teknis dan fungsional}}{\text{Jumlah PNS yang ada}} \times 100\%$	Bidang Diklat	BKD Kab. Magetan
	4. Prosentase pejabat struktural yang mengikuti diklat PIM	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang ikut diklat PIM}}{\text{Jumlah Pejabat yang ada}} \times 100\%$	Bidang Diklat	BKD Kab. Magetan

	5. Prosentase Penurunan pelanggaran disiplin dan etika PNS	$\frac{\text{Jml pelanggaran disiplin PNS th. Berjalan}}{\text{Jml. Pelanggaran disiplin PNS th. lalu}} \times 100\%$	Bidang Inka	BKD Kab. Magetan
	6. Prosentase penurunan indikasi kasus pidana yang melibatkan PNS	$\frac{\text{Jml pelanggaran PNS terkait pidana th. Berjalan}}{\text{Jml pelanggaran PNS terkait pidana tahun lalu}} \times 100\%$	Bidang Inka	BKD Kab. Magetan
	7. Prosentase CPNS sesuai dengan kebutuhan pegawai (formasi dan bezeeting pegawai)	$\frac{\text{Jml CPNS yg sesuai dengan kebutuhan}}{\text{Jumlah usulan formasi CPNS}} \times 100\%$	Bidang Pengembangan	BKD Kab. Magetan
	8. Prosentase peserta yang lulus ujian sertifikasi barang dan jasa	$\frac{\text{Jumlah peserta yang lulus ujian}}{\text{Jumlah peserta ujian sertifikasi}} \times 100\%$	Bidang Diklat	BKD Kab. Magetan
	9. Prosentase PNS yang mendapatkan penghargaan	$\frac{\text{Jml PNS yang dapat penghargaan}}{\text{Jumlah PNS}} \times 100\%$	Bidang Inka	BKD Kab. Magetan
	10. Prosentase peserta sosialisasi	$\frac{\text{Jml PNS yang mengikuti sosialisasi}}{\text{Jumlah PNS}} \times 100\%$	Bidang Inka	BKD Kab. Magetan
	11. Jumlah mesin SIPO yang dipasang	$\frac{\text{Jumlah mesin SIPO yang terpasang}}{\text{Jumlah PNS}} \times 100\%$	Bidang Inka	BKD Kab. Magetan
	12. Prosentase PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar	$\frac{\text{Jumlah PNS yang mendapat bantuan}}{\text{Jumlah PNS peserta tugas belajar}} \times 100\%$	Bidang Diklat	BKD Kab. Magetan

	13. Jumlah calon praja IPDN yang lulus	<u>Jumlah calon praja IPDN yang lulus</u> Jml calon Paraja IPDN	X 100%	Bidang Diklat	BKD Kab. Magetan
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik bidang kepegawaian	1. Nilai Sor IKM naik	<u>Nilai IKM tahun berjalan</u> Nilai IKM tahun lalu	X 100%	Bagian Umum dan Kepegawaian	BKD Kab. Magetan
	2. Jumlah penerbitan SK ijin belajar dan tugas belajar	Jumlah SK ijin belajar dan tugas belajar yang diterbitkan tahun berjalan	X 100%	Bidang Diklat	BKD Kab. Magetan
	3. Jumlah penerbitan karis, karsu dan taspen bagi PNS	Jumlah penerbitan karis, karsu, dan taspen bagi PNS tahun berjalan	X 100%	Bidang Inka	BKD Kab. Magetan
	4. Jumlah penerbitan SK Kenaikan pangkat	Jumlah SK Kenaikan pangkat tahun berjalan	X 100%	Bidang Mutasi	BKD Kab. Magetan
	5. Jumlah penerbitan SK pensiun tahun berjalan	Jumlah SK pensiun tahun berjalan	X 100%	Bidang Mutasi	BKD Kab. Magetan
3. Meningkatnya kualitas penataan SDM Aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi(Right Sizing)	1. Jumlah peserta seleksi rekrutmen CPNS	Jumlah peserta seleksi rekrutmen CPNS	X 100%	Bidang Pengembangan	BKD Kab. Magetan
	2. Jumlah Pegawai non PNS	Jumlah Pegawai Non PNS	X 100%	Bidang Pengembangan	BKD Kab. Magetan
	3. % penetapan pejabat struktural dan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya	Jumlah penetapan jabatan struktural dan <u>fungsional sesuai kebutuhan</u> Jumlah jabatan yang ada	X 100%	Bidang Pengembangan	BKD Kab. Magetan

	4. Jumlah usulan formasi PNS sesuai kebutuhan	Jumlah usulan formasi PNS sesuai kebutuhan	X 100%	Bidang Pengembangan	BKD Kab. Magetan
4. Meningkatnya kualitas informasi PNS	1. Jumlah pengembangan aplikasi SIMPEG	Jumlah pengembangan aplikasi SIMPEG	X 100%	Bidang Informasi Kepegawaian	BKD Kab. Magetan
	2. Jumlah record yang diupdating	$\frac{\text{Jumlah record yang diupdating}}{\text{Jumlah total PNS}}$	X 100%	Bidang Informasi Kepegawaian	BKD Kab. Magetan
	3. Jumlah SKPD yang terkoneksi dengan sistem SIMPEG BKD	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang terkoreksi dengan jaringan database BKD}}{\text{Jumlah SKPD Kab. Magetan}}$	X 100%	Bidang Informasi Kepegawaian	BKD Kab. Magetan
	4. Jumlah SKPD yang mengirim / melaporkan/mengentri peremajaan data kepegawaian	Jumlah SKPD yang mengirim / melaporkan/mengentri <u>peremajaan data kepegawaian</u> Jumlah SKPD Kabupaten Magetan	X 100%	Bidang Informasi Kepegawaian	BKD Kab. Magetan

18. Instansi : Inspektorat Kab. Magetan

Visi : Terwujudnya APIP yang professional dalam rangka membangun system pengawasan yang efektif.

Misi : a. Meningkatkan peran Inspektorat sebagai quality assurance dan consulting dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.  
b. Membangun sinergi yang baik antar unsur pengawasan.  
c. Menjadi katalisator pencapaian tujuan pemerintah Kab. Magetan dengan jalan memberikan informasi umpan balik kepada Kepala Daerah melalui pelaksanaan pengawasan internal atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Tugas : a. Melaksanakan pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah Kabupaten.  
b. Melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan desa.

Fungsi : a. Perencanaan Program Pengawasan.  
b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi Pengawasan  
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1. Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Magetan.	1. Persentase tindak lanjut selesai dari temuan BPK, BPKP, Itwilprop, Inspektorat Daerah.	$\frac{\text{Jumlah tindak lanjut selesai}}{\text{Jumlah temuan}} \times 100\%$	Inspektorat Kab. Magetan / Irban	Inspektorat Kab. Magetan
	2. Persentase penurunan jumlah temuan berulang dalam LHP Tahun ke N dari BPK, BPKP, Itwilprop, Inspektorat Daerah.	$\frac{\text{Jml temuan berulang tahun N}}{\text{Jumlah temuan berulang tahun N - 1}} \times 100\%$	Inspektorat Kab. Magetan / Irban	Inspektorat Kab. Magetan

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kab. Magetan.	Persentase Kategori Hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan Nilai Minimal CC berdasarkan Hasil Sampling	$\frac{\text{Jml SKPD sampling bernilai CC}}{\text{Jumlah SKPD sampling}} \times 100\%$	Inspektora at Kab. Magetan / Irban	Inspektorat Kab. Magetan
3. Terciptanya system pengaduan masyarakat yang efektif	% laporan pengaduan masyarakat / kasus yang selesai ditindaklanjuti setiap tahun	$\frac{\text{Jumlah laporan kasus selesai}}{\text{Jumlah pengaduandfw}} \times 100\%$	Inspektora at Kab. Magetan / Irban	Inspektorat Kab. Magetan

19. INSTANSI : BADAN LINGKUNGAN HIDUP

VISI : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan

MISI : Bersama mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam di Kabupaten Magetan

TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- c. Pengembangan penyusunan program, pengawasan, pemantauan, evaluasi di bidang Lingkungan Hidup
- d. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan		Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kualitas dan Fungsi Lingkungan melalui pengendalian sumber-sumber pencemar serta Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berwawasan Lingkungan	Prosentase penurunan bebabn pencemaran parameter kunci BOD di sungai Gandong	$\frac{\text{BOD Th 2013}-\text{BOD Th 2014}}{\text{BOD Tahun 2013}}$	X 100	BLH	BLH
	Prosentase penurunan beban pencemaran parameter kunci COD di sungai Gandong	$\frac{\text{COD Th. 2013} - \text{COD Th. 2014}}{\text{COD Th. 2013} - \text{COD Th. 2014}}$	X 100	BLH	BLH

	Prosentase ketaatan industri di tinjau dari perizinan dokumen lingkungan ( AMDAL, UKL-UPPL, SPPL, DPI dll )	$\frac{\text{Jml. Perusahaan yg taat th.2014}}{\text{Jml. Seluruh Perusahaan Th. 2014}}$	X 100	BLH	BLH
Meningkatnya Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat di dalam	Jml desa/kelurahan yg masuk dalam kriteria desa/kelurahan yg bersih dan lestari	Jml desa/kel. Yg masuk dlm kriteria desa/kel. Yg bersih dan lestari ( berseri )		BLH	BLH
	Jml sekolah peduli dan berbudaya ( Adiwiyata )	Jml sekolah peduli dan berbudaya		BLH	BLH
	Jml orang penerima penghargaan lingkungan hidup	Jumlah penerima kalpataru		BLH	BLH
	Prosentase penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat yg sesuai dengan kewenangan	$\frac{\text{Jml. Kasus pengaduan yg ditindaklanjuti Th. 2014}}{\text{Jml seluruh pengaduan yg masuk tahun 2014}}$	X 100	BLH	BLH



20. Instansi : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAGETAN

Visi : Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang tertib dan akuntabel menuju pemerintahan yang baik

Misi :

1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola keuangan daerah yang profesional
2. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib
3. Optimalisasi manajemen aset daerah

Tugas : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan daerah

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah ;
- b. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan PAPBD ;
- c. Penyusunan kebijakan pedoman pelaksanaan APBDP ;
- d. Pelaksanaan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan DPA-PPKD/DPPA-PPKD ;
- e. Pelaksanaan pengendalian APBD ;
- f. Perumusan dan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah
- g. Pelaksanaan penetapan surat Penyediaan Dana (SPD).
- h. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ;
- i. Penyiapan dokumen pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;
- j. Pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah ;
- k. Penyajian informasi keuangan daerah ;
- l. Pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- m. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD ;

- n. Perumusan dan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah ;
- o. Perumusan dan penyusunan sistem dan prosedur penatausahaan akuntansi dan laporan keuangan ;
- p. Penatausahaan atas piutang daerah atau tagihan daerah ;
- q. Penatausahaan atas pinjaman daerah dan obligasi daerah ;
- p. Pelaksanaan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
- q. Pelaksanaan penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaan pengelolaan aset daerah ;
- r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
1	2	3	4	5	
Meningkatkan pengelolaan keuangan yang tertib, efektif dan akuntabel	1. % Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan PAPBD  2. % Penyusunan rancangan peraturan daerah ttg pertanggungjawabn  3. % Pemantapan pengelolaan keuangan daerah  1. % administrasi	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang menyusun RKA/RKPA dan DPA/DPPA sesuai ketentuan yang berlaku} \times 100}{\text{Jml SKPD}}$  $\frac{\text{Jml SKPD yang menyusun Lap. Keesuaian ketentuan yang berlakudan menyampaikan tepat waktu}}{\text{Jml SKPD}} \times 100$  $\frac{\text{Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan bintek-bintek}}{\text{Jml SKPD}} \times 100\%$	RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD KABUPATEN MAGETAN  Laporan pertanggungjawaban SKPD KABUPATEN MAGETAN  BPKAD KABUPATEN MAGETAN	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KABUPATEN MAGETAN  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah KABUPATEN MAGETAN  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Meningkatnya pelayanan keuangan	<p>pengelolaan keuangan daerah dan pencairan dana yang tertib, efektif</p> <p>2. Permasalahan TP/TGR dapat diselesaikan dan semua kerugian daerah dapat dikembalikan ke kas daerah</p>	<p><math>\frac{\text{Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu}}{\text{Jumlah SP2D yang diterbitkan}} \times 100\%</math></p> <p><math>\frac{\text{Jml TP/TGR yang terselesaikan}}{\text{Jml TP/TGR}} \times 100</math></p>	<p>SP2D SKPD Pemerintah KABUPATEN MAGETAN</p> <p>Laporan TP/TGR Pemerintah daerah KABUPATEN MAGETAN</p>	<p>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</p>	
Meningkatnya pengembangan manajemen aset daerah Kabupaten Magetan	<p>1. %inventarisasi aset daerah</p> <p>2. % Pendataan aset daerah, pemeliharaan aset daerah</p> <p>3. % aset tetap tanah yang bersertifikat</p>	<p><math>\frac{\text{Jumlah aset daerah yang telah terinventarisasi}}{\text{Jml aset}} \times 100\%</math></p> <p><math>\frac{\text{Jumlah aset yang terdata}}{\text{Jml aset}} \times 100</math></p> <p><math>\frac{\text{Jumlah aset tanah yang telah bersertifikasi Pemda Kabupaten Magetan}}{\text{Jml aset tanah}} \times 100\%</math></p>	<p>Data inventaris aset/barang SKPD Pemerintah</p> <p>BPKAD</p> <p>BPKAD</p>	<p>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</p> <p>BPKAD</p> <p>Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah</p>	

21. INSTANSI : Badan Ketahanan Pangan Kab. Magetan

V I S I : Terwujudnya pemantapan ketahanan Pangan yang merata menuju masyarakat sejahtera

MISI :

1. Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Cadangan Pangan
2. Pemantapan Distribusi dan Akses Pangan
3. Pemantapan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
4. Penanganan Kerawanan Pangan

TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang Ketahanan Pangan

FUNGSI :

1. Penyusunan dan perumusan program serta rencana kegiatan kebijakan teknis dalam bidang Ketahanan Pangan
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati

NO	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA/PENANGGUNG JAWAB	KET
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	Melakukan pembinaan dan pengembangan cadangan pangan Pemerintah Desa, pangan pokok tertentu serta Lumbung Pangan masyarakat	Penguatan Cadangan Pangan	a. Cadangan Pangan di tingkat pemerintah : <ul style="list-style-type: none"><li>• Tersedianya cadangan Pemerintah di tingkat Kabupaten/ Kota minimal sebesar 100 ton ekuivalen Beras</li><li>• Tersedianya cadangan pangan pemerintah, minimal 25 ton ekuivalen Beras.</li></ul> b. Cadangan Pangan di tingkat masyarakat : <ul style="list-style-type: none"><li>• Penyediaan cadangan pangan sebesar 500 kg ekuivalen Beras di</li></ul>	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	-

			<p>tingkat rukun tetangga (RT) untuk kebutuhan minimal 3 bulan,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya lembaga cadangan pangan masyarakat minimal 1- 2 di setiap Kecamatan;</li> </ul> <p>c. Cara Perhitungan/Rumus :          Nilai Capaian Bidang merupakan Jumlah Cadangan Pangan Kabupaten dibagi 100 ton kali 100 %</p>		
2.	Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui bantuan usaha produktif di 5 Desa Rawan Pangan dan bantuan bahan Pangan ke 25 desa Rawan Pangan Kronis	Penanganan Daerah Rawan Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui pencegahan kerawanan pangan disuatu wilayah sedini mungkin dan penanggulangan rawan pangan melalui bantuan bahan makanan	Bidang Pengembangan Konsumsi Pangan	-
3.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun dan menganalisis Neraca Bahan Pangan (NBM) di tingkat Kabupaten</li> <li>• Melakukan pembinaan dan pelatihan dalam rangka peningkatan ketersediaan pangan berbahan baku lokal</li> </ul>	Peningkatan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Angka Kecukupan Gizi (AKG) ditetapkan di Indonesia setiap lima tahun sekali melalui forum Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG). Salah satu Rekomendasi WKNPG ke VIII tahun 2004 menetapkan tingkat ketersediaan energi sebesar 2.200 kal/Kapita/Hari dan protein 57 gram/Perkapita/Perhari.</li> <li>▪ Penyediaan pangan terdiri dari komponen produksi, perubahan stok, impor dan ekspor</li> </ul>	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	-
4.	Tersedianya data informasi harga dan akses pangan	Peningkatan Ketersediaan Informasi, Pasokan Harga	Menyediakan data dan informasi mencakup komoditas : Gabah atau Beras, Jagung, Kedele, Daging Sapi. Daging Ayam, Telur, Minyak Goreng,	Bidang Pengendalian Pangan	-

		dan Akses Pangan	Gula pasir, Cabe merah yang disajikan dalam periode Mingguan/ Bulanan/ Kwartal/ Tahunan		
5.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemantauan ketersediaan, harga dan pasokan pangan</li> <li>Melakukan koordinasi melalui forum Dewan Ketahanan Pangan</li> </ul>	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	a. Harga dinyatakan stabil jika gejolak harga pangan di suatu wilayah kurang dari 25 % dari kondisi normal. b. Pasokan pangan dinyatakan stabil jika penurunan pasokan pangan di suatu wilayah berkisar antara 5 % - 40 %.	Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan	-
6.	Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) melalui Sosialisasi B2SA sebanyak 80 orang, Diversifikasi pangan olahan lokal/lahan kering sebanyak 5 kelompok dan Pengembangan Karangkitri sebanyak 10 Kelompok	Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Penyediaan informasi panganekaragaman pangan masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang sesuai standart kecukupan energi dan protein perkapita perhari (PPH)	Bidang Pengembangan Konsumsi Pangan	-
7.	Tercukupinya pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman bagi masyarakat	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Menyediakan informasi tentang keamanan pangan, koordinasi dengan instansi terkait tentang pengendalain dan pengawasan peredaran bahan kimia yang disalahgunakan untuk pangan, pembinaan dan pengawasan mutu keamanan pangan, peningkatan Pengetahuan dan pemahaman terhadap keamanan pangan disekolah	Bidang Pengendalian Pangan	-

22. Instansi : BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA (BPPKB) MAGETAN

Visi : Terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera

Misi :

1. Meningkatkan dukungan manajemen yang handal dalam pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
2. Mengatur pertumbuhan penduduk seimbang;
3. Meningkatkan advokasi dan peran serta untuk pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
4. Meningkatkan ketahanan keluarga;
5. Meningkatkan kesejahteraan keluarga;
6. Meningkatkan pengelolaan potensi keluarga;
7. Meningkatkan pengarus utamaan gender; dan
8. Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak

Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Kabupaten Magetan yang bersifat spesifik yaitu bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Fungsi :

1. Pengumpulan data guna perumusan kebijakan, melakukan analisa dan menyusun program pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
2. Pembinaan dan pengembangan organisasi perempuan dan keluarga berencana;
3. Pembinaan peran serta perempuan dalam pembangunan.

KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL / FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB	KETERANGAN
KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA			

1	2	3	4	5
1. Meningkatkan Kompetensi dan Kinerja Aparatur	<p>a. Persentase Aparatur Yang Memiliki SKP Kriteria Baik Minimal 85%</p> <p>b. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Aparatur Kriteria Minimal Baik</p> <p>c. Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Dengan Kriteria Valid dan Reliabel Minimal 85%</p> <p>d. Persentase Penyusunan Dokumen Keuangan Dengan Kriteria Benar 100%</p>	<p>Jumlah SKP Baik ----- x 100% Jumlah aparatur</p> <p>Menghitung Nilai rata-rata tiap unsur (NR) Menghitung Nilai rata-rata kali nilai timbang = nilai rata-rata tiap unsur x 0,071 Menghitung Nilai rata-rata dari rata-rata nilai timbang Menghitung nilai IKM = Nilai rata-rata dari nilai timbang x 25</p> <p>Jumlah Dokumen Yang Valid dan Reliabel ----- x 100 % Jumlah Dokumen Yang Disusun</p> <p>Jumlah Dokumen Keuangan Yang benar ----- x 100 % Jumlah Dokumen Keuangan</p>	Sekretariat	
2. Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Pelayanan Pemasangan Alat Kontrasepsi KB	<p>Jumlah akseptor laki-laki dan perempuan yang terlayani ----- x 100% Jumlah Pasangan Usia Subur</p>	Bidang KB dan Bidang Advokasi	
3. Meningkatkan Usia Kawin Pertama (UKP) Wanita Melalui Program Generasi Berencana (GENRE) dan	Persentase Median Usia Kawin Pertama (UKP) Wanita 21 Tahun Minimal	<p>Jumlah Pernikahan Usia 21 Tahun Untuk Wanita ----- x 100% Total Pernikahan Seluruh Usia</p>	Bidang KB dan Bidang Advokasi	



Pendewasaan Usia Perkawinan	30 %	Untuk Wanita		
4. Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas SDM Pengelola PIK	<p>a. Persentase Peningkatan Kuantitas Jumlah PIK Remaja Baru 20%</p> <p>b. Persentase Peningkatan Stratifikasi PIK Remaja Tegar 48%</p>	<p>Jml PIK Remaja Baru ----- x 100%</p> <p>Jml PIK Remaja</p> <p>Jml PIK Remaja Tegar ----- x 100%</p> <p>Jml PIK Remaja</p>	Bidang KB	
5. Meningkatnya Pemahaman masyarakat Terhadap Program KKB	Persentase Peningkatan Pemahaman Institusi Masyarakat/Remaja Terhadap Program KKB	<p>Jml Inst. Masyarakat/Remaja Yg Ikut Sosialisasi ----- x 100%</p> <p>Jml Institusi Masyarakat/Remaja</p>	Bidang Advokasi	
6. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui UPPKS	Persentase Peningkatan Tahapan Keluarga Sejahtera dari Pra S ke KS I dan KS I ke KS II melalui UPPKS	<p>Jumlah Keluarga Tergabung Dalam UPPKS ----- x 100%</p> <p>Jumlah Keluarga</p>	Bidang KS	
7. Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Ketahanan Keluarga (TRIBINA)	<p>a. Persentase Peningkatan Strata Tribina Dasar ke Berkembang 50 %</p> <p>b. % Peningkatan Strata Tribina Berkembang ke Paripurna sebesar 30%</p>	<p>Jml Tribina Dasar ----- x 100%</p> <p>Jml Tribina Berkembang</p> <p>Jml Tribina Berkembang ----- x 100%</p> <p>Jumlah Tribina Paripurna</p>	Bidang KS	
8. Tercukupinya Kebutuhan Kader KB di lini lapangan	<p>a. Rasio Jumlah PPKBD dengan jumlah desa</p> <p>b. Rasio Jumlah Sub PPKBD dengan Jumlah RW.</p>	<p>Jumlah PPKBD ----- x 100%</p> <p>Jumlah Desa di Kab. Magetan</p> <p>Jumlah Sub PPKBD ----- x 100%</p>	Bidang Pengelolaan Potensi	

		Jumlah RW di Kab. Magetan		
9. Tersedianya data PP dan KB yang akurat	Persentase tersedianya data keluarga dan KB di 235 desa	Jumlah Desa yang tersedia data keluarga dan data KB ----- x 100% Jumlah desa di Kab. Magetan	Bidang Pengelolaan Potensi	
10. Menurunnya Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	Persentase Penurunan Tindak Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan	Jumlah Korban Kekerasan Tahun Ini ----- X 100 % Jumlah Korban Kekerasan Tahun Lalu	Bidang PP	
11. Meningkatnya Pengarusutamaan Gender	a. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah  b. Persentase Perempuan Sebagai Pengurus Parpol  c. Persentase Perempuan Di Legislatif	Jml Pekerja Pr di Lemb. Pemerintah -----x 100% Jml Pekerja di Lemb. Pemerintah  Jml Perempuan Pengurus Parpol ----- x 100% Jml Pengurus Parpol  Jml Perempuan di Legislatif -----x 100% Jml Anggota Legislatif	Bidang PP	
12. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Mendapat Penanganan Oleh Petugas Terlatih di Unit PPA	Jumlah Kekerasan Yang Ditangani -----x 100% Jumlah Kekerasan	Bidang PP	

23. INSTANSI : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN MAGETAN

VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pemerintah Desa Yang Mandiri dan Demokratis

MISI :

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa serta optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan
2. Meningkatkan kapasitas sosial budaya, partisipasi, keswadayaan dan kegotongroyongan masyarakat
3. Meningkatkan kapasitas pemerintahan desa dan masyarakat

TUGAS : Memimpin, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam merumuskan perencanaan, kebijakan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

FUNGSI :

- a. pengembangan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- c. pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat;
- e. pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

NO	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	2	3	4	5	6

1.	Terbentuknya lembaga PKK yang partisipatif	Prosentase (%) peningkatan kegiatan PKK di Desa	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah PKK}}$	Data PKK kabupaten	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes.
2.	Terbentuknya Lembaga dan Organisasi Posyandu di pedesaan	Prosentase (%) peningkatan kegiatan Posyandu di Desa	$\frac{\text{Jumlah Posyandu aktif}}{\text{Total posyandu}}$	Data posyandu Dinkes	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes.
3.	Terbentuknya Kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat dan pemasaran hasil usaha di Desa/Kelurahan	1. Prosentase (%) yang membentuk kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat (UPKu)	Jumlah Desa/Kel yang membentuk UPKu dibagi jumlah Desa/Kel x 100%	Data UEM Bapermas Kab. Magetan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes.
		2. Prosentase (%) Desa yang membentuk BUMDes	Jumlah BUMDes dibagi Jml Desa x 100%	Data UEM Bapermas Kab. Magetan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes.
		3. Prosentase (%) pasar desa yang dikembangkan	Jumlah Pasar Desa yang dikembangkan dibagi jml pasar desa x 100 %	Data UEM Bapermas Kab. Magetan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes.
4.	Mewujudkan siswa didik yang sehat dan cerdas	Prosentase (%) siswa SD/Mi yang diberikan tambahan makanan bergizi	Jumlah SD/MI yang diberikan dibagi jml SD/MI keseluruhan x 100%	Data Sosbud Bapemas kab. Magetan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes.
5.	Mewujudkan kualitas dan produktifitas UMKM	Prosentase (%) pelatihan UMKM pemanfaat TTG	Jumlah UMKM pemanfaat TTG dibagi jml UMKM keseluruhan x 100%	Data TTG bapermas kab. Magetan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes.
6.	Memotivasi perangkat desa, masyarakat dan lembaga Desa/Kel untuk terus melakukan pembangunan di pedesaan	Prosentase (%) Evaluasi desa/Kelurahan Berhasil	Jumlah Desa/kelurahan pemenang lomba desa/Kel dibagi Jumlah Desa/Kel Keseluruhan x 100%	Data PKD Bapemas Kab. magetan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes.

7.	Terwujudnya Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan yang partisipatif	Prosentase (%) yang RPJMDes tersusun	Jumlah Desa yang terfasilitasi penyusunan RPJMDes dibagi jumlah desa Keseluruhan x 100 %	Data PKD Bapemas Kab. magetan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pempdes.
8.	Terfasilitasinya komunitas masyarakat serta pengembangan nilai social dan budaya yang partisipatif	Prosentase (%) yang Desa/Kel terfasilitasinya komunitas masyarakat pengembangan nilai budaya (Kelompok adat,masyarakat sekitar hutan,BBGRM)	Jumlah desa/kel yang terfasilitasi komunitas masyarakat pengembangan nilai social dibagi jumlah desa/kel x 100%	Data Sosbud Bapemas Kab. magetan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pempdes.
9.	Terfasilitasinya desa/kel untuk penguatan kapasitas kelembagaan melalui pendataan profil desa/kel di desa/kel dan kader pemberdayaan masyarakat	Prosentase (%) Desa/Kel yang telah melaksanakan pendataan (entry) Profil Desa/Kel	Prosentase Desa/Kel. Yang telah melaksanakan pendataan profil Desa/Kel disbanding 25% jumlah Desa/Kel x 100%	Data PKD Bapemas Kab. magetan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pempdes.
		Prosentase (%) KPM yang terlatih sesuai Permendagri 7 tahun 2007	Prosentase KPM yang terlatih sesuai permendagri 7 tahun 2007 dibagi seluruh KPM	Data PKD Bapemas Kab. magetan	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pempdes.

24. Instansi : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB MAGETAN

Visi : Terwujudnya kehidupan masyarakat Magetan yang aman, demokratis dan kepastian hukum

Misi :

1. Perwujudan kerukunan sosial dalam rangka menghargai kebhinekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan;
2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menciptakan rasa nyaman, tentram, tertib dan damai yang berlandaskan semangat kebersamaan dalam NKRI;
3. Perwujudan dan penegakan kedaulatan rakyat/ masyarakat yang dilandasi dengan semangat gotong-royong dan kekeluargaan;
4. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan antar kelompok dalam keragaman suku, ras, agama, budaya dan adat istiadat yang ada dalam NKRI;
5. Penegakan kepastian dan perlindungan hukum dengan penyelenggaraan pemerintahan otonomi yang bersih dan berwibawa;
6. Pengamalan 4 (empat) pilar kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
7. Meningkatkan peran serta Masyarakat dalam upaya deteksi dini, memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaian masalah yang timbul di tengah - tengah masyarakat.
8. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Organisasi Kemasyarakatan yang profesional dalam menjalankan fungsi – fungsi organisasinya

Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu bidang kesatuan bangsa dan politik

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan strategis pembangunan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- b. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pembangunan sistem politik dalam negeri;
- c. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan dalam rangka kesatuan dan persatuan bangsa, dan kewaspadaan nasional
- d. Pelaksanaan kajian strategis di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan bidang politik dalam negeri;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penegakan hak asasi manusia;
- f. Pelaksanaan koordinasi bersama lembaga instansi terkait dalam kegiatan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- g. Pelaksanaan evaluasi kegiatan dan pelaporan kegiatan badan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya antisipasi dan penyelesaian konflik untuk mewujudkan rasa tentram, tertib dan aman di masyarakat	1 Jumlah gangguan di wilayah Kab.Magetan	Jumlah Gangguan pada Tahun berjalan	Bakesbangpol Kab. Magetan	Bakesbangpol Kab. Magetan
2. Terwujudnya harmoni sosial dalam kehidupan intra dan antar umat beraga	2. Jumlah pertemuan FKUB dan FPK	Jumlah Pertemuan FKUB dan FPK pada Tahun Berjalan	Bakesbangpol Kab. Magetan	Bakesbangpol Kab. Magetan

3. Meningkatnya pemahaman politik pada masyarakat	3. Jumlah penyuluhan politik pada masyarakat	Jumlah Penyuluhan Politik Pada Masyarakat pada tahun berjalan	Bakesbangpol Kab. Magetan	Bakesbangpol Kab. Magetan
4. Terfasilitasinya pemberdayaan parpol, ormas/ LSM dan elemen masyarakat dalam memberikan masukan dalam menjaga suasana kondusif	4. Jumlah Ormas/LSM yang terdaftar	Jumlah Ormas/LSM yg terdaftar pada tahun berjalan	Bakesbangpol Kab. Magetan	Bakesbangpol Kab. Magetan

25. Instansi : KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN MAGETAN  
 TERWUJUDNYA TERTIB ARSIP DAN MAGETAN MEMBACA TAHUN  
 Visi : 2018



- Misi :
- Memantapkan kualitas sumber daya aparatur pengelola arsip dan perpustakaan yang profesional;
  - Mewujudkan peningkatan peran kearsipan sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Magetan;
  - Mewujudkan peningkatan peran kearsipan sebagai sumber dokumen kesejarahan daerah;
  - Mewujudkan peningkatan peran perpustakaan sebagai sumber minat dan budaya baca keluarga serta masyarakat;
  - Memantapkan peran sarana prasarana di sektor arsip dan perpustakaan.
- Tugas : Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan azas Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang kearsipan dan perpustakaan
- Fungsi :
- Perumusan kebijakan teknis di bidang arsip dan perpustakaan ;
  - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
  - Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya ;
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati .

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANG GUNGJAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya kompetensi pengelola perpustakaan	% SDM pengelola perpustakaan kategori Pustakawan	$\frac{\text{Jml Pengl perpus Pustakawan (n)-(n-1)}}{\text{Juml Pengl perpus Pustakawan (n-1)}} \times 100\%$	Kantor Arpus Kab. Magetan	Kasub Bag Tata Usaha
	% SDM pengelola perpustakaan kategori non Pustakawan	$\frac{\text{Juml Pengl perpus non Pustkw (n)-(n-1)}}{\text{Juml Pengl perpus non Pustakawan(n-1)}} \times 100\%$	Kantor Arpus Kab. Magetan	Kasub Bag Tata Usaha
Meningkatnya koleksi	Rasio koleksi	Jumlah koleksi perpus tercetak (n)-(n-1)	Buku Induk	Kasi

perpustakaan	perpustakaan dalam bentuk buku cetakan		Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Umum
	Rasio koleksi perpustakaan (non cetak/e-book/disket/dll)	Jumlah koleksi perpus non cetak (n)-(n-1)	Buku Induk Perpustakaan	Kasi Pengelolaan Perpustakaan Umum
Meningkatnya indeks minat dan budaya baca masyarakat	% Jumlah pemustaka pembaca	$\frac{\text{Jumlah pemustaka pembaca (n)-(n-1)}}{\text{Jumlah pemustaka pembaca (n-1)}} \times 100\%$	Buku Pengunjung/ Peminjam Perpustakaan	Kasi Pengelolaan Perpustakaan Umum
	% Jumlah pemustaka bukan pembaca	$\frac{\text{Juml pemustaka non pembaca (n)-(n-1)}}{\text{Juml pemustaka non pembaca (n-1)}} \times 100\%$	Buku Pengunjung/ Peminjam Perpustakaan	Kasi Pengelolaan Perpustakaan Umum
	Rasio nilai IKM dari kunjungan perpustakaan	Nilai IKM kunjungan perpustakaan n : (n-1)	Buku Agenda Seksi Pengembangan Arpus	Kasi Pengembangan Arpus

Meningkatnya perkembangan sistem	% jumlah SDM pengelola kearsipan Arsiparis	$\frac{\text{Juml pengll arsip Arsiparis } n - (n-1)}{\text{Juml pengll arsip Arsiparis } (n-1)} \times 100 \%$	Struktur Organisasi Kantor Arpus Kab. Magetan	Kasub Bag Tata Usaha
tata kelola arsip dan pengembangan SDM kearsipan	% jumlah SDM pengelola kearsipan non Arsiparis	$\frac{\text{Juml pengll arsip non Arsiparis } n - (n-1)}{\text{Juml pengll arsip non Arsiparis } (n-1)} \times 100 \%$	Buku Daftar Urut Kepangkatan/ Struktur Organisasi Kantor Arpus Kab. Magetan	Kasub Bag Tata Usaha
	Rasio unit kerja/ SKPD yang sudah menerapkan tata kelola kearsipan secara baku	$\frac{\text{Juml SKPD Sistem Arsip Baku } n-(n-1)}{\text{Juml SKPD Keseluruhan di Magetan}} \times 100\%$	Buku Laporan Hasil Monev Kearsipan	Kasi Pengelolan dan Layanan Arsip

26. Instansi : KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN MAGETAN

Visi : Terwujudnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu Yang Prima.

- Misi : 1. Meningkatkan profesionalisme dalam melayani masyarakat.  
 2. Menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.  
 3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melengkapi legalitas perijinan dan ikut mendorong terciptanya iklim perekonomian yang kondusif.  
 4. Membangun komitmen dan konsistensi seluruh komponen aparatur pemerintah terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
- Kedudukan : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- Tugas : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perijinan yang meliputi pelayanan perijinan, pengolahan, pelaporan, informasi dan pengaduan serta urusan ketatausahaan.
- Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis pelayanan perijinan;  
 2. Pelaksanaan pelayanan administrasi perijinan;  
 3. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;  
 4. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;  
 5. Pelaksanaan pelayanan informasi perijinan dan pengaduan;  
 6. Pelaksanaan pengolahan data potensi perijinan dan pelaporan; dan  
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati Magetan sesuai dengan tugasnya.

No.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
-----	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------	------------------

1	2	3		4	5	6
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang perijinan.	1.	Jumlah perorangan dan badan usaha yang sudah memiliki ijin.	Jumlah perorangan dan badan usaha yang sudah memiliki ijin.	Buku registrasi perijinan.	KPPT Kab. Magetan
		2.	Prosentase peningkatan pelayanan perijinan.	$\frac{\text{Jumlah ijin yang diterbitkan}}{\text{Jumlah pendaftaran perijinan}} \times 100\%$	Buku registrasi perijinan.	KPPT Kab. Magetan
		3.	Terpenuhinya target PAD retribusi perijinan.	$\frac{\text{Realisasi PAD retribusi Perijinan}}{\text{Target PAD retribusi Perijinan}} \times 100\%$	Laporan rekapitulasi retribusi perijinan.	KPPT Kab. Magetan
		4.	Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).	$\frac{\text{Nilai IKM tahun berjalan}}{\text{Nilai IKM tahun lalu}} \times 100\%$	Hasil survei IKM.	KPPT Kab. Magetan
		5.	Prosentase penanganan pengaduan masyarakat.	$\frac{\text{Jumlah penanganan pengaduan masyarakat}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat}} \times 100\%$	Laporan penanganan pengaduan.	KPPT Kab. Magetan
2.	Meningkatnya kualitas SDM aparatur perijinan.	1.	Jumlah aparatur perijinan yang sudah mengikuti diklat.	Jumlah aparatur perijinan yang sudah mengikuti diklat.	Sub Bagian Tata Usaha.	KPPT Kab. Magetan
		2.	Jumlah kegiatan pengembangan SDM aparatur perijinan.	Jumlah kegiatan pengembangan SDM aparatur perijinan.	Sub Bagian Tata Usaha.	KPPT Kab. Magetan

		3.	Jumlah sarana dan prasarana aparatur.	Jumlah sarana dan prasarana aparatur.	Sub Bagian Tata Usaha.	KPPT Kab. Magetan
3.	Tersedianya pelayanan perijinan yang terstandarisasi.	1.	Jumlah pelayanan perijinan yang berstandar mutu.	Jumlah pelayanan perijinan yang berstandar mutu ISO 9001:2008.	Data Sekretariat ISO.	KPPT Kab. Magetan
		2.	Standar Operasional Prosedur.	Jumlah pelayanan perijinan yang memiliki Standar Operasional Prosedur.	Buku SOP	KPPT Kab. Magetan
		3.	Standar Pelayanan.	Jumlah pelayanan perijinan yang memiliki Standar Pelayanan.	Buku Standar Pelayanan	KPPT Kab. Magetan
4.	Tersedianya sistem informasi pelayanan publik di bidang perijinan.	1.	Jumlah pengembangan website KPPT.	Jumlah pengembangan website KPPT.	Seksi Informasi dan Pengaduan.	KPPT Kab. Magetan
		2.	Jumlah pengembangan program SIMPADU.	Jumlah pengembangan program SIMPADU.	Seksi Informasi dan Pengaduan.	KPPT Kab. Magetan
		3.	Jumlah perijinan yang terintegrasi dengan program SIMPADU.	Jumlah perijinan yang terintegrasi dengan program SIMPADU.	Seksi Informasi dan Pengaduan.	KPPT Kab. Magetan
		4.	Jumlah sosialisasi perijinan.	Jumlah kegiatan Sosialisasi Perijinan dalam satu tahun.	Lap. sosialisasi perijinan.	KPPT Kab. Magetan
		5.	Jumlah penyebarluasan	Jumlah penyebarluasan informasi	Seksi Informasi	KPPT Kab.

			informasi perijinan.	perijinan dalam satu tahun.	dan Pengaduan.	Magetan
5.	Meningkatnya kegiatan investasi.	1.	Jumlah promosi investasi.	Jumlah promosi investasi yang diselenggarakan dalam satu tahun.	Laporan kegiatan investasi.	KPPT Kab. Magetan
		2.	Jumlah sosialisasi investasi.	Jumlah sosialisasi investasi dalam satu tahun.	Laporan kegiatan investasi.	KPPT Kab. Magetan
		2.	Jumlah pameran investasi.	Jumlah pameran investasi yang diselenggarakan dalam satu tahun.	Laporan kegiatan investasi.	KPPT Kab. Magetan
		3.	Jumlah pengembangan sistem pendukung UMKM.	Jumlah pengembangan sistem pendukung UMKM.	Laporan kegiatan KPPT.	KPPT Kab. Magetan

27. INSTANSI : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MAGETAN

VISI : Terwujudnya profesionalisme Polisi Pamong Praja

- MISI : Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat melalui penegakkan Perda / Peraturan Kepala Daerah
- TUGAS : Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya
- FUNGSI :
1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
  2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah
  3. Pelaksana kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan Tramtibum di daerah
  4. Pelaksana kebijakan perlindungan masyarakat
  5. Pelaksanan koordinasi penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNSD dan aparatur lainnya
  6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah
  7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah



SASARAN / KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA ( I K U )	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1. Meningkatnya penegakan supremasi hukum Peraturan Daerah	Jumlah operasional Penegakan Peraturan Daerah secara preemtif, preventif dan represif	$\frac{\text{Jumlah operasi penertiban}}{\text{Jumlah rencana operasi}} \times 100\%$	Data Satpol PP Kab. Magetan	Satpol PP Kab. Magetan
2. Meningkatnya Ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Data Satpol PP Kab. Magetan	Satpol PP Kab. Magetan
	Jumlah operasi pemantauan wilayah	$\frac{\text{Jml operasi pemantauan wilayah}}{\text{Jumlah rencana operasi}} \times 100\%$	Data Satpol PP Kab. Magetan	Satpol PP Kab. Magetan
	Jumlah kegiatan pengamanan dan pengawalan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pengamanan dan pengawalan}}{\text{Jumlah rencana kegiatan}} \times 100\%$	Data Satpol PP Kab. Magetan	Satpol PP Kab. Magetan
3. Meningkatnya peran Linmas dan masyarakat dalam Pam Swakarsa ( <i>Community Policing</i> )	Jumlah Linmas dan masyarakat yang terlatih dalam Pam Swakarsa	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang terlatih}}{\text{Jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan Satlinmas dalam Pam Swakarsa}} \times 100\%$	Data Satpol PP Kab. Magetan	Satpol PP Kab. Magetan

28. INSTANSI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH ( BPBD ) KABUPATEN MAGETAN
- VISI : Terwujudnya Masyarakat Magetan yang Tangguh dalam Penanganan Bencana dengan Tanggap, Cepat dan Tepat
- MISI :
- a. Terciptanya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan dini terhadap kemungkinan terjadinya bencana
  - b. Meminimalkan korban jiwa dan kerugian harta benda akibat terjadinya bencana
  - c. Terjaminnya pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai standart pelayanan minimum
  - d. Terwujudnya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana terhadap para korban
- TUGAS :
- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. Menetapkan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati;
  - f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

NO	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KET
	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan aparat dan masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di daerah rawan bencana	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Untuk Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Penanganan Bencana Alam	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Untuk Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Dalam Penanganan Bencana Alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magetan	
2.	Terantau dan Tersebar nya Informasi Daerah-Daerah Yang Berpotensi Terjadi Bencana Alam	Prosentase Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Alam	Prosentase Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magetan	
3.	Meningkatnya kualitas penyelamatan, evakuasi korban bencana dan penanganan pengungsi	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Guna Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Guna Penanggulangan Bencana Alam	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magetan	

4.	Terhindarnya Sekecil Mungkin Kerugian Jiwa dan Harta Benda Akibat Bencana	Jumlah Kegiatan Pelatihan Untuk Meningkatkan Kemampuan dan Keterampilan Anggota Tim SAR dalam Penanganan Bencana	Jumlah Kegiatan Pelatihan Untuk Meningkatkan Kemampuan dan Keterampilan Anggota Tim SAR dalam Penanganan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magetan	
5.	Terwujudnya sistem penanganan kedaruratan bencana yang efektif melalui peningkatan koordinasi penanganan kedaruratan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, dan peningkatan sistem logistik	Jumlah Personil Kegiatan Posko Siaga Darurat Penanggulangan Bencana	Jumlah Personil Kegiatan Posko Siaga Darurat Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Magetan	

29. INSTANSI : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SAYIDIMAN MAGETAN
- VISI : Rumah sakit rujukan pilihan tepat menuju sehat bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya
- MISI : Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengembangan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Magetan dan sekitarnya dengan meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit serta meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam upaya memperluas jangkauan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat sebagai wujud pelayanan yang berfokus pada keselamatan pasien
- TUGAS : Melaksanakan pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui rawat inap, rawat jalan, rawat darurat dan tindakan medis secara serasi dan terpadu sebagai upaya peningkatan pelayanan pengobatan dan pencegahan serta melaksanakan pelayanan rujukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- FUNGSI :
1. Penyelenggaraan pelayanan medis
  2. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis
  3. Penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan
  4. Penyelenggaraan pelayanan rujukan (system referal)
  5. Penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia
  6. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
  7. Penyelenggaraan tata usaha dan kerumahtanggaan

<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Meningkatnya Efisiensi dan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Bed Occupancy Rate (BOR)	$\frac{\text{Jumlah hari perawatan RS dalam waktu tertentu}}{\text{Jumlah tempat tidur x jumlah hari dalam satu satuan waktu}} \times 100\%$	Instalasi Rekam Medik	RSUD dr. Sayidiman Magetan
	Average Length of Stay (ALOS)	$\frac{\text{Jumlah hari perawatan pasien keluar rumah sakit}}{\text{Jumlah pasien keluar rumah sakit (hidup + mati)}}$	Instalasi Rekam Medik	RSUD dr. Sayidiman Magetan
	Bed Turn Over (BTO)	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}}{\text{Jumlah tempat tidur}}$	Instalasi Rekam Medik	RSUD dr. Sayidiman Magetan
	Turn Over Internal (TOI)	$\frac{(\text{Jumlah TT x hari}) - \text{hari perawatan RS}}{\text{Jumlah pasien keluar (hidup+mati)}}$	Instalasi Rekam Medik	RSUD dr. Sayidiman Magetan
	Net Date Rate (NDR)	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar mati} \geq 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar hidup dan mati}} \times 100\%$	Instalasi Rekam Medik	RSUD dr. Sayidiman Magetan
	Gros Date Rate (GDR)	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar mati}}{\text{Jumlah pasien keluar hidup dan mati}} \times 100\%$	Instalasi Rekam Medik	RSUD dr. Sayidiman Magetan
	Cost Recovery Ratio (CRR)	$\frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Belanja Operasional}} \times 100\%$	Bidang Keuangan	RSUD dr. Sayidiman Magetan
	Indek Kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai IKM	Instalasi Promosi Kesehatan RS	RSUD dr. Sayidiman Magetan

30. SKPD : BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA SETDA
- VISI : Terwujudnya Organisasi dan Tata Kerja perangkat daerah yang ideal dan aparatur yang akuntabel dan professional dalam mewujudkan pelayanan public yang lebih baik
- MISI :
1. Mewujudkan penataan dan pengembangan organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif
  2. Mewujudkan peningkatan kualitas kinerja aparatur yang akuntabel, cerdas dan profesional
  3. Mewujudkan dan mengembangkan system dan prosedur ketatalaksanaan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan public
- TUGAS : Melaksanakan penyiapan perumusan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan Kelembagaan dan kepegawaian, Pembinaan Pendayagunaan Aparatur Negara serta Analisis Jabatan dan Formasi Jabatan.
- FUNGSI :
1. penyiapan bahan pembinaan dan penataan kelembagaan dan kepegawaian dilingkup Sekretariat ;
  2. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja dan prosedur kerja ;
  3. penyiapan dan pengolahan bahan petunjuk dan pembinaan Pendayagunaan Aparatur Negara ;
  4. penyiapan bahan dan menganalisa data jabatan dan menyusun formasi jabatan berdasarkan hasil analisis jabatan ;
  5. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

NO	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KET.
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SKPD yang telah dievaluasi SO-nya</li> <li>- Prosentase SKPD yang tepat fungsi dan tugasnya</li> </ul>	<p>Jumlah SKPD yang telah dievaluasi SO-nya pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah SKPD yang tepat fungsi dan tugasnya dibanding jumlah SKPD yang ada</p>	Sub Bagian Kelembagaan dan Kepegawaian	
2	Meningkatkan kualitas dan kompetensi aparatur perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SKPD yang telah menyusun analisis jabatan</li> <li>- Jumlah SKPD yang telah menyusun Analisis Beban Kerja</li> <li>- Jumlah SKPD yang telah menyusun Evaluasi Jabatan</li> <li>- Jumlah SKPD yang telah menyusun Standar Kompetensi Manajerial</li> </ul>	<p>Jumlah SKPD yang telah menyusun analisis jabatan pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah SKPD yang telah menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah SKPD yang telah menyusun evaluasi jabatan</p> <p>Jumlah SKPD yang telah menyusun Standar Kompetensi Manajerial</p>	Sub Bagian Anjab dan Pengembangan Kinerja	
3	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja</li> <li>- Jumlah SKPD yang mengikuti Gelar Budaya Kerja Tingkat Propinsi dengan hasil baik</li> </ul>	<p>Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang diperoleh</p> <p>Jumlah SKPD yang dikirim mengikuti Gelar Budaya Kerja Tingkat Propinsi dengan Nilai Baik</p>	Sub Bagian Anjab dan Pengembangan Kinerja	



NO	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KET.
	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
4	Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan perangkat daerah dan sistem prosedur tetap pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah SKPD/Unit yang menyusun Standar Pelayanan (SP)</li> <li>- Jumlah IKM yang disusun SKPD</li> <li>- Jumlah SOP yang disusun SKPD</li> </ul>	<p>Jumlah SKPD/Unit Kerja yang telah menyusun Standar Pelayanan pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah IKM yang telah disusun SKPD pada tahun berjalan</p> <p>Jumlah SOP yang telah disusun SKPD pada tahun berjalan</p>	Sub Bagian Ketatalaksanaan	

31. INSTANSI : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
- VISI : Terwujudnya Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik
- MISI :
1. mewujudkan peningkatan kapasitas dan kualitas penyusun produk hukum daerah;
  2. mewujudkan penataan peraturan perundang-undangan daerah;
- TUGAS : Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyiapan perumusan kebijakan produk hukum dan telaahan hukum, penyusunan produk hukum daerah, pemberian bantuan hukum, penerbitan dan pendokumentasian produk hukum.
- FUNGSI :
- a. Penyiapan bahan dan koordinasi dalam perumusan kebijakan produk hukum dan telaahan hukum;
  - b. Penyiapan bahan dan koordinasi serta perumusan produk hukum daerah;
  - c. Penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah;
  - d. Pengelolaan dokumentasi hukum;
  - e. Pengevaluasian dan pengkajian produk hukum daerah;
  - f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	2	3	4	5
<b>5. Pembentukan produk hukum Kabupaten Magetan</b>	1. Jumlah Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang terbentuk sebanyak 346	$\frac{\text{Jumlah Perbup dan Keputusan Bupati yang terbentuk 346}}{\text{Jumlah usulan Perbup dan Keputusan Bupati yang masuk 346}} \times 100\%$	Usulan rancangan produk hukum yang masuk.	Bagian Hukum Setda Kabupaten Magetan
	2. Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Magetan yang terbentuk sebanyak 10	$\frac{\text{Jumlah Perda Kabupaten Magetan yang terbentuk 10}}{\text{Jumlah Raperda 10}} \times 100\%$	Usulan Raperda.	Bagian Hukum Setda Kabupaten Magetan
<b>2. Pelaksanaan penyuluhan hukum.</b>	Jumlah desa yang mendapat penyuluhan hukum. 9 desa	Jumlah desa yang telah mendapat penyuluhan hukum sebanyak 9 desa	Data Laporan Kegiatan	Bagian Hukum Setda Kabupaten Magetan

32. Instansi : Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab. Magetan
- Visi : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Daerah, dan Desa yang Efektif dan Efisien
- Misi : Percepatan Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pemerintahan Umum
- Tugas : Melaksanakan penyiapan perumusan program dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa / Kelurahan
- Fungsi :
- a. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan prasarana fisik pemerintahan
  - b. penyiapan bahan dan menganalisis data serta memberikan pertimbangan dalam rangka pembinaan Perangkat Daerah
  - c. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan peningkatan sumber pendapatan daerah
  - d. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan teknis penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Kelurahan
  - e. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan Desa dan Kelurahan
  - f. penyiapan mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pengembangan desa dan pembinaan lembaga desa
  - g. penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perangkat dan administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan
  - h. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Meningkatnya kinerja instansi pemerintahan	Prosentase Aspek dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magetan yang memiliki capaian kinerja dengan predikat Tinggi	$\frac{\text{Jumlah aspek dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magetan yang memiliki capaian kinerja dengan predikat Tinggi}}{\text{Jumlah aspek dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Magetan}} \times 100$	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Kasubbag. Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah & Kerjasama
Mewujudkan pengisian jabatan dan pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta anggota / pimpinan DPRD yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku	1. Terselenggaranya pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Fasilitasi pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilu Kepala Daerah	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Kasubbag. Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah & Kerjasama
	2. Prosentase Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Magetan yang terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah PAW Anggota DPRD Kabupaten Magetan yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah pengajuan PAW Anggota DPRD Kabupaten Magetan}} \times 100$	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Kasubbag. Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah & Kerjasama
Terselenggaranya kerjasama antar daerah perbatasan	Prosentase tercapainya Perjanjian Kerjasama antar daerah perbatasan yang terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Perjanjian Kerjasama yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah Perjanjian Kerjasama yang dibahas}} \times 100$	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Kasubbag. Pemerintahan Umum, Perangkat Daerah & Kerjasama

Terselenggaranya Pemerintahan Desa / Kelurahan yang efektif dan efisien	1. Prosentase peningkatan kualitas aparatur desa/kelurahan	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang telah mengikuti bimbingan teknis (bintek)}}{\text{Jumlah aparatur desa}} \times 100$	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Kasubbag. Pemerintahan Desa & Kelurahan
	2. Prosentase Pemilihan Kepala Desa yang terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang telah terfasilitasi}}{\text{Jumlah Pemilihan Kepala Desa}} \times 100$	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Kasubbag. Pemerintahan Desa & Kelurahan
	3. Prosentase pengisian perangkat desa yang terfasilitasi	$\frac{\text{Jumlah pengisian perangkat desa yang telah terfasilitasi}}{\text{Jumlah pengisian perangkat desa}} \times 100$	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Kasubbag. Pemerintahan Desa & Kelurahan
	4. Prosentase Penyelesaian Permasalahan Tanah Kas Desa	$\frac{\text{Jumlah masalah Tanah Kas Desa yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah masalah Tanah Kas Desa}} \times 100$	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Kasubbag. Pertanahan
Mewujudkan tertib administrasi pertanahan bagi pemerintah desa / kelurahan, serta fasilitasi pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Magetan untuk kepentingan pembangunan	1. Prosentase peningkatan tata kelola pertanahan bagi desa / kelurahan	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang telah mengikuti bimbingan teknis (bintek)}}{\text{Jumlah aparatur desa / kelurahan}} \times 100$	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Kasubbag. Pertanahan
	2. Prosentase fasilitasi pengadaan tanah dengan SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan yang mengadakan kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pengadaan tanah oleh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan untuk kepentingan pembangunan yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah kegiatan pengadaan tanah oleh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Magetan untuk kepentingan pembangunan}} \times 100$	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	Kasubbag. Pertanahan

33. INSTANSI : Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
- VISI : Terdepan dalam mewujudkan pelayanan yang prima
- MISI : Meningkatkan kualitas layanan di bagian keuangan , rumah tangga, perlengkapan, tata usaha dan sandi telekomunikasi
- TUGAS : Menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bagian keuangan, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha dan sandi telekomunikasi.
- FUNGSI :
- a. Perumusan kebijakan bagian keuangan, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha dan sandi telekomunikasi
  - b. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bagian keuangan, rumah tangga, perlengkapan, tata usaha dan sandi telekomunikasi
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
  - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi dan Umum

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
Meningkatnya Layanan di bidang keuangan Setda Kab. Magetan	Prosentase pelayanan di bidang keuangan	$\frac{\text{Jml pelayanan di bidang keuangan yg Terselesaikan}}{\text{Jumlah pelayanan di bidang Keuangan}} \times 100\%$	Bagian Umum	Bagian Umum

Meningkatnya layanan bidang ke rumahtanggaan di lingkungan setda kab.Magetan	Prosentase pelayanan di bidang kerumahtanggaan	Jml layanan bidang kerumah Tanggaan yang tercukupi X 100% Jml layanan bidang kerumah Tanggaan	Bagian Umum	Bagian Umum
Meningkatnya layanan sarana dan prasarana di lingkungan setda kab. Magetan	Prosentase pelayanan sarana prasarana di lingkup setda	Jml pelayanan sarana prasarana Di lingkup setda yg terfasilitasi X 100 Jml pelayanan sarana prasarana Di lingkup setda	Bagian Umum	Bagian Umum
Meningkatnya Layanan Arsip Ekspedisi dan Sanditel di lingkup setda kab. Magetan	Prosentase pelayanan arsip ekspedisi dan sanditel di lingkungan setda kab. Magetan	Jml layanan arsip ekspedisi dan Sanditel yg terfasilitasi X 100% Jml pelayanan Arsip ekspedisi Dan sanditel	Bagian Umum	Bagian Umum



34. INSTANSI : Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
- VISI : Terwujudnya Penyusunan Kebijakan dan Pengkoordinasian Kegiatan Perekonomian Daerah melalui berbagai Program Pengungkit
- MISI : Meningkatkan pelayanan administrasi dan koordinasi dibidang kebijakan pengembangan perekonomian daerah melalui program pengungkit yang sinergis
- TUGAS : Melaksanakan, menyiapkan, perumusan pedoman dan petunjuk teknis serta memonitor perkembangan dibidang Penanaman Modal, BUMD, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- FUNGSI :
- a. Penyiapan dan pengolahan data dalam kegiatan investasi di daerah serta kegiatan promosi daerah;
  - b. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dibidang Pertanian, Perindustrian dan Perdagangan;
  - c. Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan perbankan daerah dan perusahaan daerah, lembaga perkreditan, koperasi dan UKM;
  - d. Pengumpulan dan pengolahan perijinan Penanaman Modal;
  - e. Pelaksana monitoring terhadap kerjasama Penanaman Modal di semua bidang.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
6. Terlaksananya sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai	Jumlah masyarakat yang mengetahui Ketentuan Dibidang Cukai	Data Laporan Kegiatan	Bag.Adm.Perekonomian Setda Kabupaten Magetan
2. Terlaksananya Penagihan Tunggakan KEK Intan Pesada	Jumlah penagihan tunggakan KEK Intan Pesada	$\frac{\text{Jumlah Angsuran Masuk}}{\text{Jumlah Total Tunggakan}} \times 100\%$	Bank Jatim	Bag.Adm.Perekonomian Setda Kab.Magetan
3. Terlaksananya Program Raskin dengan tertib administrasi dan pelaksanaan	Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat ( RTSPM ) yang mendapat beras Raskin	Jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat ( RTSPM ) yang mendapat beras Raskin	Data TNP2K olahan sumber data PPLS 2011	Bag. Adm. Perekonomian Setda Kabupaten Magetan
4. Tersedianya data perekonomian dan investasi yang valid dan akurat dalam rangka pengambilan kebijakan ekonomi daerah	Jumlah data potensi ekonomi dan peluang investasi di Kabupaten Magetan	Kumulatif jumlah modal usaha perusahaan yang telah mengajukan perijinan	Data laporan SKPD yang berwenang mengeluarkan ijin	Bag.Adm.Perekonomian Setda Kab. Magetan
5. Terwujudnya koordinasi kegiatan lingkup Bagian Adm. Perekonomian dalam dan luar daerah	Jumlah kegiatan koordinasi lingkup Bagian Adm. Perekonomian dalam dan luar daerah	Jumlah kegiatan koordinasi yang diikuti	Data laporan kegiatan	Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Magetan
6. Terlaksananya kegiatan investasi untuk mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya ekonomi lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kegiatan pameran dan kerjasama investasi</li> <li>Jumlah produk hukum investasi / Penanaman Modal di Kab. Magetan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kegiatan pameran dan kerjasama investasi</li> <li>Jumlah produk hukum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data laporan kegiatan</li> <li>Data laporan kegiatan</li> </ul>	Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Magetan

35. Instansi : BAGIAN ADMINSTRASI PEMBANGUNAN
- Visi : Menjadi katalisator pembaharuan sistem administrasi pembangunan yang maju dan mandiri melalui pengendalian yang profesional
- Misi :
1. Melaksanakan penyiapan penyusunan pedoman dan pelaksanaan teknis, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi administrasi pembangunan;  
*Pernyataan misi pertama ini memiliki maksud, bahwa setiap pelaksanaan pembangunan harus didasarkan pada pedoman pelaksanaan (Manlak) APBD dan disertai dengan monitoring dan evaluasi.*
  2. Melaksanakan pengendalian pembangunan yang profesional guna mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan pembangunan daerah.  
*Pernyataan misi kedua ini memiliki maksud, bahwa setiap pelaksanaan pembangunan akan efektif dan efisien jika dilandasi "PANCA TERTIB" (Tertib Perencanaan, Anggaran, Pelaksanaan, Administrasi dan Pelaporan, Pengawasan) disertai sistem pengendalian yang profesional.*
- Tugas : Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi bidang penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan kegiatan pembangunan.
- Fungsi :
- a. Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan;
  - b. Pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan;
  - c. Pengawasan dan pemantauan di bidang penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
  - e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga / instansi lain di bidang penyusunan pelaksanaan program, pengendalian dan pelaporan; dan
  - f. Pelaksanaan tugas – tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUN G JAWAB
1	2	3	4	5
<p>1. Meningkatnya kualitas perencanaan pelaksanaan pembangunan melalui penyusunan standarisasi harga satuan, pedoman pelaksanaan program pembangunan daerah dan menciptakan manfaat sebesar-besarnya dari belanja pemerintah bagi perekonomian, termasuk mendorong demokratisasi ekonomi dan melaksana-nakan belanja secara efisien dan efektif melalui pengadaan barang/jasa;</p>	<p>Jumlah dokumen persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan</p> <p>% SKPD yang mempedomani pedoman pelaksanaan APBD</p> <p>% Paket Pengadaan Barang/Jasa yang diproses melalui ULP / LPSE</p>	<p>Jumlah dokumen yang dipedomani SKPD</p> <p>Jumlah SKPD yang mempedomani dokumen pedoman pelaksanaan APBD yang terbit</p> <p>Jumlah Paket ----- x 100% Jumlah total Paket</p>	<p>Bagian Administrasi Pembangunan</p>	<p>Bagian Administrasi Pembangunan</p>
<p>2. Meningkatnya kualitas manajemen administrasi pembangunan melalui tertib administrasi</p>	<p>Prosentase realisasi fisik dan keuangan</p>	<p>Jumlah realisasi dana APBD ----- x 100% Jumlah total APBD</p>		

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUN G JAWAB
1	2	3	4	5
<p>pemba-ngunan melalui pengen-dalian pelaksanaan pembangunan daerah serta meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan pembangu-nan yang didukung oleh keterse-diaan data yang akurat untuk keperluan evalausi pembangunan melalui penyusunan Laporan Sistem Monito-ring TEPPA (<i>Sismontep</i>) serta ketersediaan 7 layanan informasi jasa konstruksi melalui pembinaan jasa konstruksi.</p>	<p>Persentase tersedianya 7 layanan informasi Jasa Konstruksi tingkat Kabupaten</p>	<p>Jumlah realisasi fisik ----- x 100% Jumlah total fisik</p> <p>Pembuatan Jadwal Kerja, berupa Curva S dan Bar Cart</p> <p><b>UKURAN                   KEBERHASILAN PROYEK</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Diselesaikan dalam <b>waktu</b> sesuai rencana</li> <li>2. Dilaksanakan dengan <b>kualitas</b> sesuai yang ditetapkan (<i>material dan pengerjaan</i>)</li> <li>3. Dilaksanakan dengan <b>kuantitas</b> sesuai yang ditetapkan</li> <li>4. Diselesaikan dalam batasan <b>biaya</b> yang ditetapkan</li> <li>5. Dilaksanakan dengan <b>tertib administrasi</b> sesuai yang ditetapkan.</li> </ol>		

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

36. INSTANSI : Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan
- Visi : Sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Magetan dalam meningkatkan Kinerja manajemen Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang berprinsip pada Kesejahteraan Masyarakat.
- Misi :
1. Berperan Aktif Administrasi Kesejahteraan Masyarakat untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya secara Profesional.
  2. Menyusun dan membuat petunjuk teknis dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan Evaluasi Administrasi Kesejahteraan Rakyat.
  3. Mewujudkan tertib Administrasi Kesejahteraan Rakyat untuk perkembangan di bidang Kesehatan, Agama, Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olah Raga.
- Tugas : Melaksanakan dan mengoordinasikan penyusunan program dan petunjuk teknis pembinaan serta memantau pemberian bantuan dan perkembangan kegiatan pelayanan sosial.
- Fungsi :
- a. pengumpulan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis pembinaan di Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  - b. pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan pemberian bantuan di bidang pelayanan dan Bantuan Sosial;
  - c. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan saran dan pertimbangan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
  - d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan bidang agama dan kesehatan;
  - e. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang pendidikan, generasi muda, olah raga, peranan wanita, ketenagakerjaan dan kesehatan; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah

<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUN G JAWAB</b>
1	2	3	4	5
1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat kurang mampu.	1. Jumlah pelaksanaan sunatan masal	Jumlah masyarakat kurang mampu yang mengikuti sunatan masal.	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan
2. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	1. Jumlah kegiatan sosial, peringatan hari besar nasional dan hari jadi Kabupaten Magetan.	Jumlah kegiatan sosial, peringatan hari besar nasional dan hari jadi Kabupaten Magetan yang telah dilaksanakan	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan
4. Meningkatnya harmoni sosial dalam kehidupan beragama.	1. Jumlah lembaga/ organisasi keagamaan dan sarana peribadatan.	Jumlah lembaga/ organisasi keagamaan dan sarana peribadatan yang difasilitasi.	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan
	2. Jumlah hari besar keagamaan.	Jumlah peringatan hari besar keagamaan.	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat Setdakab. Magetan

37. Instansi : Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Magetan
- Visi : Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam secara optimal, lestari dan berwawasan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Magetan ;
- Misi : Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan, konservasi, pengendalian, dan pengawasan sumber daya alam (bidang pertanian, hutbun, pertambangan, energy dan lingkungan hidup) di Kabupaten Magetan ;
- Tugas : Menyiapkan dan menyusun bahan koordinasi di bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan serta Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup ;
- Fungsi :
  - 1) Penyusunan dan pengolahan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang Pertanian ;
  - 2) Penyusunan dan pengolahan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang Kehutanan dan Perkebunan ;
  - 3) Penyusunan dan pengolahan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup ;
  - 4) Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan Sekretaris Daerah.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUN G JAWAB
1	2	3	4	5
1. Meningkatkan fungsi koordinasi dan fasilitasi pendayagunaan, konservasi, pengendalian, dan pengawasan sumber daya alam	1) Prosentase tersedianya data potensi, pendaya-gunaan, konservasi dan pencegahan akibat daya rusak sumber daya alam di Kabupaten Magetan.  2) Prosentase terlaksananya kegiatan monitoring/peman-tauan, evaluasi dan pelaporan, pendayagunaan dan pengawas-an potensi sumber daya alam di Kabupaten Magetan.	Jumlah potensi SDA yang terdata, jumlah halaman data dan jumlah penggandaan buku data SDA dalam angka.  $\frac{\text{Jmh. potensi SDA yg diukur}}{\text{Jmh. Potensi SDA}} \times 100 \%$	Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda Kab. Magetan.	Kepala Bagian Administrasi Sumber Daya Alam Setda Kab. Magetan



	<p>3) Prosentase tersusunnya regulasi yang mengatur tentang tata kelola sumber daya alam di Kabupaten Magetan.</p> <p>4) Prosentase terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pe-nyuluhan Perundang-undangan tentang pendayagunaan dan konservasi potensi sumber daya alam di Kabupaten Magetan.</p> <p>5) Prosentase bantuan hibah pemasangan jaringan listrik PLN bagi KK miskin.</p> <p>6) Prosentase pengembangan/pemanfaatan energy baru dan terbarukan.</p> <p>7) Prosentase terlaksananya kegiatan monitoring / pemantauan pendistribusian BBM, LPG dan pupuk bersubsidi.</p> <p>8) Prosentase terlaksananya kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan sumber daya alam di Kab. Magetan.</p>	<p><u>Jmh. Regulasi yang disusun</u> x 100 % Jmh. Regulasi terkait SDA</p> <p><u>Jmh. Kegiatan Yang diukur</u> x 100% Jmh. Sasaran kegiatan</p> <p><u>Jmh. KK miskin yang diukur</u> x 100 % Jmh. KK miskin blm. Pas. listrik</p> <p>Jumlah dan jenis energy baru dan terbarukan yang dikembangkan.</p> <p><u>Jmh. Distributor yang diukur</u> x 100 % Jmh. Distributor yang ada</p> <p><u>Jmh. Koordinasi yang diukur</u> x 100 % Jmh. Kegiatan koordinasi</p>		
--	---	---	--	--

38. Instansi : Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan

Visi : Mewujudkan pelayanan informasi dan komunikasi yang transparan dan seimbang dalam rangka membangun citra pemerintah

Misi :

1. Pemberdayaan Aparatur humas dan protokol yang profesional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
2. Berperan sebagai komunikator yang proaktif dalam menerjemahkan berbagai kebijakan dan program pemerintah
3. Mediator yang menjebatani pemerintah dan menampung aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat
4. Berperan sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi baik untuk kepentingan internal organisasi maupun masyarakat

Tugas : Melaksanakan tugas-tugas penerangan dan komunikasi baik ke dalam maupun keluar guna memperjelas kebijakan Pemerintah Kabupaten, pengaturan acara dinas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta pelaksanaan kegiatan protokol Bupati dan atau Wakil Bupati.

Fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis di bidang hubungan masyarakat dan protokol meliputi peliputan, penyiaran, kegiatan-kegiatan pelayanan informasi dan keprotokolan;
- b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemantauan serta kegiatan evaluasi kegiatan hubungan masyarakat dan protokol;
- c. Pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi secara langsung maupun melalui media massa;
- d. Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara Pemerintah Kabupaten;

- e. Pengaturan acara dinas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dan kegiatan protokoler Bupati atau Wakil Bupati;
- f. Melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan atau Asisten Administrasi dan Umum.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1. Peningkatan akses informasi	1. Ekspose media cetak, elektronik dan website 2. Ekspose informasi pembangunan yang disampaikan secara langsung (siaran keliling atau penyuluhan pada kegiatan siaran keliling) 3. Ekspose informasi pembangunan yang disampaikan melalui media spanduk, baliho, poster, leaflet	150 press rilis per tahun  <u>Jumlah kegiatan pemutaran film dan siaran keliling</u> Jumlah informasi yang disampaikan pada waktu pemutaran film dan siaran keliling X100%  <u>Jumlah spanduk, baliho, poster, leaflet yang dicetak</u> Jumlah spanduk, baliho, poster, leaflet yang menginformasikan pembangunan keliling X100%	Media massa yang beroperasi di Kab Magetan dan dokumentasi keg. Bagian Humas dan Protokol	Bagian Humas dan Protokol Setdakab Magetan
2. Dokumentasi kegiatan dan kebijakan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Kab. Magetan	4. Kegiatan dan kebijakan yang terdokumentasikan dan terliput	<u>Jumlah Keg &amp; Kebijakan yg terdokumentasi dan terliput</u> Jumlah Kegiatan dan Kebijakan X100%	Data Kegiatan Bupati, Wabup dan Sekdakab	Bagian Humas dan Protokol Setdakab Magetan
3. Meningkatnya pelayanan protokoler	5. Kegiatan Bupati, Wakil Bupati, dan Sekdakab yang telayani secara protokoler	<u>Jumlah keg yang telayani secara protokoler</u> Jumlah Kegiatan X100%	Data Kegiatan Bupati, Wabup dan Sekdakab	Bagian Humas dan Protokol Setdakab Magetan

39. Instansi : Kecamatan Magetan
- Visi : Terwujudnya pemerintahan yang baik menuju kesejahteraan masyarakat yang adil mandiri dan bermatabat
- Misi :
1. Menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan demokratis
  2. Meningkatkan sualitas SDM aparatur di segala aspek
  3. Meningkatkan kualitas pelayanan
  4. Meningkatkan fungsi koordinatif dan pemberdayaan masyarakat
- TUGAS : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan
- FUNGSI :
- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan sosial;
  - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;
  - e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan per Undang-undangan;
  - f. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - h. Pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat kepada masyarakat;
  - i. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan ;
  - j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
  - k. Pembinaan kepegawaian Pegawai Negri Sipil ( PNS ) di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;

1. Perencanaan kegiatan dan anggaran Kecamatan dalam rangka pelaksanaan APBD;
- m. Pelaksanaan kegiatan perencanaan , evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA/ PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>KETERANGAN</b>
Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan Pembangunan dalam wilayah tugas Kecamatan Magetan	1. Jumlah Koordinasi bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditindaklanjuti	Jumlah kuantitatif	SKPD Kecamatan Magetan, SKPD Teknis, Pemerintah Desa / Kelurahan	Tindak lanjut berupa kegiatan, administrasi dan fisik
Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks pelayanan masyarakat	SKPD Kecamatan Magetan, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat	Survey IKM pada pengguna layanan kecamatan
Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur	3. Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas SDM aparatur SKPD Kecamatan Magetan	Jumlah kuantitatif	SKPD Kecamatan Magetan	Kegiatan peningkatan ketrampilan, disiplin, pengetahuan

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan sistem pemerintahan pada SKPD dan Desa bidang keuangan	4. Jumlah kegiatan monev, fasilitasi dan pemeriksaan serta pengawasan pengelolaan keuangan	Jumlah kuantitatif	SKPD Kecamatan Magetan, Pemerintah Desa/kelurahan	Pengelolaan keuangan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban
--	--	--------------------	---	---

40. SKPD : KECAMATAN NGARIBOYO
- VISI : Terwujudnya Kecamatan Ngariboyo yang maju, mandiri dan berwawasan lingkungan
- MISI :
1. Mengoptimalkan sumber daya aparatur pemerintahan kecamatan dalam rangka transparansi birokrasi secara professional dan proposional
  2. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat
  3. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
  4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat
- TUGAS : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan
- FUNGSI :
- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan sosial;
  - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;
  - e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan per Undang-undangan;
  - f. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - h. Pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat kepada masyarakat;
  - i. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan ;

- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- k. Pembinaan kepegawaian Pegawai Negri Sipil ( PNS ) di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- l. Perencanaan kegiatan dan anggaran Kecamatan dalam rangka pelaksanaan APBD;
- m. Pelaksanaan kegiatan perencanaan , evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

NO	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA	KET
	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	2	3	4	5	6
1	Terselenggaranya pelayanan jasa dan administrasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata rata Indeks kepuasan masyarakat</li> </ul>	Formulasi Data Survey IKM	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Ngariboyo
2	Meningkatnya Pelayanan Publik dibidang administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• persentase Pelayanan KK</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan KK}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib Memiliki KK}} \times 100\%$	Kasi Tata Pemerintahan	Kecamatan Ngariboyo
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pelayanan Perekaman eKTP</li> </ul>	$\frac{\text{Jml Pelayanan Perekaman e KTP}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib e-KTP}} \times 100\%$	Kasi Tata Pemerintahan	Kecamatan Ngariboyo



3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan administrasi dan keuangan Desa/ Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase SPJ ADD Desa/ Kelurahan yang telah diselesaikan</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah SPJ ADD desa / Kelurahan}}{\text{Jumlah Desa/ Kelurahan}} \times 100 \%$	Kasi PMD	Kecamatan Ngariboyo
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• persentase Buku Profil Desa yang telah diselesaikan</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Buku Profil Desa/ Kel.}}{\text{Jumlah desa/ Kelurahan}} \times 100 \%$	Kasi PMD	Kecamatan Ngariboyo
4	Meningkatnya dan Terbinanya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Desa/ Kelurahan Lunas PBB</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Desa/ Kel. Lunas PBB}}{\text{Jumlah Desa/ Kelurahan}} \times 100 \%$	Sekretaris Kecamatan	Kecamatan Ngariboyo
5	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• persentase Penurunan Jumlah Konflik dan gangguan keamanan</li> </ul>	$\frac{\text{Jml Konflik yang telah dpt Diatasi}}{\text{Jumlah Konflik yang terjadi}} \times 100 \%$	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Kecamatan Ngariboyo

41. Instansi : Kantor Kecamatan Karas
- Visi : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Daerah dan Desa yang efektif dan efisien
- Misi : Percepatan Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pemerintahan Umum
- Tugas : Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan
- Fungsi :
- a. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - b. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Sosial;
  - c. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Ekonomi dan Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Pemuda dan Olahraga ;
  - e. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang – Undangan ;
  - f. Pengkoordinasian Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Pelayanan Umum ;
  - g. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan ;
  - h. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi surat menyurat kepada masyarakat ;
  - i. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan ;

- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan ;
- k. Pembinaan Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan ;
- l. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Kecamatan dalam rangka pelaksanaan APBD ;
- m. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan ; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	2	3	4	5
Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban umum	$\frac{\text{Koordinasi yang terlaksana}}{\text{Jumlah Koordinasi}} \times 100\%$	Kantor Kecamatan Karas	SKPD Kec. Karas
	Jumlah Koordinasi pemerintahan dan pembangunan	$\frac{\text{Koordinasi yang terlaksana}}{\text{Jumlah Koordinasi}} \times 100\%$		

42. SKPD : KECAMATAN PARANG
- VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Magetan yang Adil , Mandiri dan Bermartabat
- MISI :
1. Mewujudkan Kepemerintahan Yang Baik Dan Peningkatan SDM Yang Proporsional , Dilandasi Semangat Pelaksanaan OTODA
  2. Mewujudkan Sarana Dan Prasarana Infrastruktur Yang Memadai Dalam Menunjang Pertumbuhan Perekonomian Daerah
  3. Mewujudkan Suasana Aman Dan Damai Melalui Penegakan , Kepastian Dan Perlindungan Hukum.
- TUGAS : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan
- FUNGSI :
- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan sosial;
  - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;
  - e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan per Undang-undangan;
  - f. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - h. Pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat kepada masyarakat;
  - i. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan ;
  - j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

- k. Pembinaan kepegawaian Pegawai Negri Sipil ( PNS ) di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- l. Perencanaan kegiatan dan anggaran Kecamatan dalam rangka pelaksanaan APBD;
- m. Pelaksanaan kegiatan perencanaan , evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

NO	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KET
	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	2	3	4	5	6
1	Terselenggaranya pelayanan jasa dan administrasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rata rata Indeks kepuasan masyarakat</li> </ul>	Formulasi Data Survey IKM	SKPD Kecamatan Parang	SKPD Kecamatan Parang
2	Meningkatnya Pelayanan Publik dibidang administrasi Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• persentase Pelayanan KK</li> <li>• Persentase Pelayanan Perekaman eKTP</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan KK dan KTP}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib Memiliki KK}} \times 100\%$	SKPD Kecamatan Parang	SKPD Kecamatan Parang
			$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Perekaman e KTP}}{\text{Jumlah Penduduk Wajib e-KTP}} \times 100\%$	SKPD Kecamatan Parang	SKPD Kecamatan Parang
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan administrasi dan keuangan Desa/ Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase SPJ ADD Desa/ Kelurahan yang telah diselesaikan</li> <li>• persentase Buku Profil Desa yg. tih diselesaikan</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah SPJ ADD desa /Kelurahan}}{\text{Jumlah Desa/ Kelurahan}} \times 100\%$	SKPD Kecamatan Parang	SKPD Kecamatan Parang
			$\frac{\text{Jumlah Buku Profil Desa/ Kelurahan}}{\text{Jumlah desa/ Kelurahan}} \times 100\%$	SKPD Kec.Parang	SKPD Kec. Parang

4	Meningkatnya dan Terbinanya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persentase Desa/ Kelurahan Lunas PBB</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Desa/ Kel. Lunas PBB}}{\text{Jumlah Desa/ Kelurahan}} \times 100\%$	SKPD Kecamatan Parang	SKPD Kecamatan Parang
5	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>persentase Penurunan Jumlah Konflik dan gangguan keamanan</li> </ul>	$\frac{\text{Jml Konflik yang telah dpt Diatasi}}{\text{Jumlah Konflik yang terjadi}} \times 100\%$	SKPD Kecamatan Parang	SKPD Kecamatan Parang

43. INSTANSI : KECAMATAN PLAOSAN
- VISI : Terwujudnya Aparatur Pemerintah Yang Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)
- MISI :
- Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Umum
  - Meningkatkan Kualitas Pembinaan, dan koordinasi di dalam daerah maupun diluar daerah.
- TUGAS : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan
- FUNGSI :
- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan sosial;
  - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;
  - e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan per Undang-undangan;
  - f. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - h. Pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat kepada masyarakat;
  - i. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan ;
  - j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

- k. Pembinaan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- l. Perencanaan kegiatan dan anggaran Kecamatan dalam rangka pelaksanaan APBD;
- m. Pelaksanaan kegiatan perencanaan , evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

<b>KINERJA UTAMA</b>		<b>DEFINISI OPERASIONAL &amp; FORMULA PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>			
Meningkatnya kualitas pelayanan prima bagi masyarakat di Kecamatan Plaosan	1. % Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Nilai IKM	Hasil Survey	Subag Umum
	2. % Rekomendasi pelayanan Kependudukan yang tepat waktu sesuai SOP	Jml Pelayanan <u>Dokumen tepat waktu</u> x 100 Jml. Dok. Yg masuk	Data Kecamatan Plaosan	Subag umum
Meningkatnya koordinasi antar sektor	✓ % hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	Jumlah koordinasi yang <u>ditindaklanjuti</u> x 100 % Jml. koordinasi	Data Kecamatan Plaosan	SKPD Kecamatan Plaosan



44. Instansi : KECAMATAN KAWEDANAN
- Visi : mewujudkan kesejahteraan masyarakat magetan yang adil mandiri dan bermatabat
- Misi :  
- Meningkatkan kualitas pelayanan Umum  
- Meningkatkan kwalitas pembinaan ,koordinasi dan rapat-rapat
- TUGAS : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan
- FUNGSI :
- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan sosial;
  - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;
  - e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan per Undang-undangan;
  - f. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - h. Pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat kepada masyarakat;
  - i. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan ;
  - j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
  - k. Pembinaan kepegawaian Pegawai Negri Sipil ( PNS ) di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
  - l. Perencanaan kegiatan dan anggaran Kecamatan dalam rangka pelaksanaan APBD;

m. Pelaksanaan kegiatan perencanaan , evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;

n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

NO.	KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL & FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA /	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Kualitas pelayanan prima bagi masyarakat di wilayah Kecamatan Kawedanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- % Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan kawedanan</li> <li>- % rekomendasi pelayanan kependudukan yang tepat waktu sesuai SOP</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Nilai IKM</p> <p style="text-align: center;">Jml pelayanan Kependudukan <u>yang tepat waktu</u> X 100 Juml dokumen yang masuk</p>	Hasil survei melalui questioner	SKPD Kecamatan Kawedanan
	Meningkatnya koordinasi lintas sektor	<ul style="list-style-type: none"> <li>-% hasil Koordinasi dibidang keamanan dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti</li> <li>-% kegiatan koordinasi bidang pemerintahan, dan pembangunan kemasyarakatan</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Jumlah Koordinasi yang <u>ditindak lanjuti</u> x 100 Jumlah Jumlah koordinasi</p> <p style="text-align: center;"><u>Jumlah kegiatan terlaksana</u> x 100 jumlah target kegiatan</p>	<p style="text-align: center;">Data Kecamatan Kawedanan</p> <p style="text-align: center;">Data kecamatan Kawedanan</p>	<p style="text-align: center;">SKPD Kecamatan Kawedanan</p> <p style="text-align: center;">SKPD Kecamatan Kawedanan</p>

45. INSTANSI : Kecamatan Maospati
- VISI : Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik Melalui Pelayanan Prima Pada Masyarakat
- MISI :
1. Mewujudkan SDM yang Profesional
  2. Mewujudkan suasana aman dan damai dengan mengembangkan budaya gotong royong dan kebersamaan
  3. Mewujudkan Kepuasan Pelanggan
- Tugas : Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan
- Fungsi :
- a. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - b. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Sosial;
  - c. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Ekonomi dan Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda dan Olahraga ;
  - e. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang – Undangan ;
  - f. Pengkoordinasian Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Pelayanan Umum ;

- g. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan ;
- h. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi surat menyurat kepada masyarakat ;
- i. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan ;
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan ;
- k. Pembinaan Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan ;
- l. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Kecamatan dalam rangka pelaksanaan APBD ;
- m. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan ; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati

<b>KINERJA UTAMA</b>		<b>DEFINISI OPERASIONAL &amp; FORMULA PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>			
Meningkatnya kualitas pelayanan prima bagi masyarakat di Kec. Maospati	Prosentase IndeK kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	$\frac{\text{JmlRespondenPuas} \times 100}{\text{Jml. Responden}} \%$	Hasil Survey	Subag Umum

	Prosentase Rekomendasi pelayanan Kependudukan yang tepat waktu sesuai SOP	$\frac{\text{Jml Layanan Kepend. yg tepat}}{\text{Jml. Dokumen Yg masuk}} \times 100 \%$	Data Kec Maospati	Kasi Pemerintahan
Meningkatnya koordinasi antar sektor	Prosentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml koord. yg ditindaklanjuti}}{\text{Jml. Koordinasi}} \times 100 \%$	Data Kec. Maospati	SKPD Kecamatan Maospati
Meningkatnya Peran serta wanita / PKK dalam keluarga dan masyarakat	Prosentase anggota TP PKK Desa Kelurahan yang aktif dalam kegiatan pemberdayaan wanita	$\frac{\text{Jml Anggota TP PKK yg Aktip}}{\text{Jml. Anggota TP PKK}} \times 100 \%$	Data Kec. Maospati	Kasi Permas Pendes
Meningkatnya Sistem pengawasan administrasi dan dokumen pertanggungjawaban pemerintahan dan aparatur Desa / Kelurahan	Prosentase Monev dapat terlaksana dengan baik	$\frac{\text{Jml Monev yg terlasana dg baik}}{\text{Jml. Monev}} \times 100 \%$	Data Kec. Maospati	Kasi Permas Pendes

46. INSTANSI : Kecamatan Nguntoronadi
- VISI : Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mewujudkan pemerintahan yang baik ( Good Governance )
- MISI :
- ✓ Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Umum
  - ✓ Meningkatkan Kualitas Pembinaan, dan Koordinasi di dalam daerah maupun luar daerah
- Tuga : Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan
- Fungsi :
- a. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - b. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Sosial;
  - c. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Ekonomi dan Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Pengkordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Pemuda dan Olahraga ;
  - e. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang – Undangan ;
  - f. Pengkoordinasian Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Pelayanan Umum ;

- g. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
- h. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi surat menyurat kepada masyarakat ;
- i. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan ;
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan ;
- k. Pembinaan Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan ;
- l. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Kecamatan dalam rangka pelaksanaan APBD ;
- m. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan ; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati

<b>KINERJA UTAMA</b>		<b>DEFINISI OPERASIONAL &amp; FORMULA PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>			
Meningkatnya kualitas pelayanan prima bagi masy. di Kec. Nguntoronadi	Prosentase Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	IKM	Kec Nguntoronadi	Subag Umum

	Prosentase Rekomendasi pelayanan Kependudukan yang tepat waktu sesuai SOP	Jml Layanan <u>Kependudukan yg tepat waktu</u> x 100 Jml. Dokumen Yg masuk	Data Kec Nguntoronadi	Kasi Pemerintahan
Meningkatnya koordinasi antar sektor	Prosentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	<u>Jml koordinasi yang ditindaklanjuti</u> x 100 Jml. Koordinasi	Kec. Nguntoronadi	Kec. Nguntoronadi



47. Instansi : Kantor Kecamatan Karangrejo
- Visi : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Daerah dan Desa yang efektif dan efisien
- Misi : Percepatan Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pemerintahan Umum
- Tugas : Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan
- Fungsi :
- a. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - b. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Sosial;
  - c. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Ekonomi dan Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Pemuda dan Olahraga ;
  - e. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang – Undangan ;
  - f. Pengkoordinasian Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Pelayanan Umum ;
  - g. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan ;
  - h. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi surat menyurat kepada masyarakat ;
  - i. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan ;

- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan ;
- k. Pembinaan Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan ;
- l. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Kecamatan dalam rangka pelaksanaan APBD;
- m. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan ; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	2	3	4	5
Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban umum	Koordinasi yang terlaksana _____ x 100% Jumlah Koordinasi	Kantor Kecamatan Karangrejo	SKPD Kec. Karangrejo
	Jumlah Koordinasi pemerintahan dan pembangunan	Koordinasi yang terlaksana _____ x 100% Jumlah Koordinasi		

48. Instansi : Kantor Kecamatan Bendo

Visi : Terwujudnya Masyarakat Bendo yang Sejahtera, adil dan bermartabat

Misi :

1. Meningkatkan pelayanan masyarakat dan administrasi perkantoran
2. Meningkatkan sumber daya aparatur pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat
3. Meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa

Tugas : Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Sosial;
- c. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Ekonomi dan Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Pemuda dan Olahraga ;
- e. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang – Undangan ;
- f. Pengkoordinasian Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Pelayanan Umum ;

- g. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan ;
- h. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi surat menyurat kepada masyarakat ;
- i. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan ;
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan ;
- k. Pembinaan Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan ;
- l. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Kecamatan dalam rangka pelaksanaan APBD;
- m. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan ; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran di Kecamatan Bendo	% Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan  % Rekomendasi Pelayanan yang Tepat Waktu Sesuai SOP	Nilai IKM  $\frac{\text{Jml Pelayanan Dok. Yg Tepat Waktu}}{\text{Jml Desa/Kelurahan}} \times 100\%$	Kantor Kecamatan Bendo  Kantor Kecamatan Bendo	Kantor Kecamatan Bendo  Kantor Kecamatan Bendo

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Desa/Kelurahan	% SPJ ADD Desa/Kelurahan yang telah disesuaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jml SPJ ADD Desa/Kelurahan yg diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jml Desa/Kelurahan}} \times 100\%$	Kantor Kecamatan Bendo	Kantor Kecamatan Bendo
Meningkatnya koordinasi antar sektor	% hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml koordinasi yg ditindaklanjuti}}{\text{Jml koordinasi}} \times 100\%$	Kantor Kecamatan Bendo	Kantor Kecamatan Bendo

49. Instansi : KECAMATAN TAKERAN

Visi : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Magetan Yang Adil Mandiri dan Bermartabat

Misi :

- Mewujudkan Kepemerintahan yang baik dan peran SDM yang profesional dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah
- Mewujudkan prosedur pelayanan yang cepat, tepat, efektif dan efisien sehingga pelayanan prima dapat terwujud menuju pemerintahan yang baik
- Menciptakan komunikasi dan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dengan program peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud

TUGAS : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan

FUNGSI :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan sosial;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;
- e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan per Undang-undangan;

- f. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- h. Pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat kepada masyarakat;
- i. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan ;
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- k. Pembinaan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- l. Perencanaan kegiatan dan anggaran Kecamatan dalam rangka pelaksanaan APBD;
- m. Pelaksanaan kegiatan perencanaan , evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

<b>KINERJA UTAMA</b>		<b>DEFINISI OPERASIONAL &amp; FORMULA PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
<b>KINERJA UTAMA / SASARAN STRATEGI</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>			
Mewujudkan Kepemerintahan yg baik dan peran SDM yg profesional dilandasi semangat pelaksanaan otonomi daerah	1. % kegiatan peningkatan tata adm.kepemerintahan yg baik	$\frac{\text{Jml jenis laporan serta administrasi pemerintahan yang baik}}{\text{Jml Dokumen}} \times 100$	Kecamatan Takeran	Kecamatan Takeran

	2. % Peningkatan profesionalitas SDM aparatur pemerintah kecamatan dan desa di kecamatan takeran	Jumlah jenis kegiatan peningkatan <u>SDM aparatur yang terealisasi</u> X 100 Jml jenis keg. Peningkatan SDM aparatur	Data Kecamatan Takeran	Kecamatan Takeran
Mewujudkan prosedur pelayanan yang cepat, tepat, efektif dan efisien sehingga pelayanan prima dapat terwujud menuju ke pemerintahan yang baik	% IKM terhadap pelayanan di kecamatan takeran	Nilai IKM	Data Kecamatan Takeran	Kecamatan Takeran
	% Rekomendasi pelayanan kependudukan yg tepat waktu sesuai SOP	<u>Jml pelayanan kependudukan</u> X 100 Jml Dok yang Masuk	Data Kecamatan Takeran	Kecamatan Takeran
Mencipkan komunikasi dan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dengan program peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga program peningkatan kesejahteraan masyarakat bisa terwujud	- % hasil koordinasi di bidang keamanan dan ketertiban umum yang ditindak lanjuti	<u>Jml koord. yg ditindaklanjuti</u> X100% Jml koordinasi	Data Kecamatan Takeran	Kecamatan Takeran
	- % kegiatan koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan masyarakat	<u>Jml keg yg terlaksana</u> X 100% Jml target kegiatan	Data Kec. Takeran	Kecamatan Takeran
	- % kegiatan koordinasi bid. kesejahteraan sosial	<u>Jml keg. Yg terlaksana</u> X 100% Jml target kegiatan	Data Kec. Takeran	Kecamatan Takeran



50. INSTANSI : KECAMATAN SUKOMORO
- VISI : Terwujudnya Pelayanan Masyarakat yang Prima dengan meningkatkan 6 K ( Keamanan, Kesehatan, Keindahan, Kekeluargaan, Ketertiban dan Kerindangan ).
- MISI :
- 1.Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Umum
  - 2.Meningkatkan Kualitas Pembinaan, dan koordinasi di dalam daerah maupun diluar daerah.
- TUGAS : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan
- FUNGSI :
- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan sosial;
  - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;
  - e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan per Undang-undangan;
  - f. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - h. Pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat kepada masyarakat;
  - i. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan ;

- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- k. Pembinaan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- l. Perencanaan kegiatan dan anggaran Kecamatan dalam rangka pelaksanaan APBD;
- m. Pelaksanaan kegiatan perencanaan , evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan prima bagi masyarakat di Kecamatan Plaosan	1. % Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	IKM	Hasil Survey	Subag Umum
	2. % Rekomendasi pelayanan Kependudukan yang tepat waktu sesuai SOP	$\frac{\text{Jml dok. SOP}}{\text{Jml. Dok. Yg masuk}} \times 100 \%$	Data Kecamatan Sukomoro	Subag umum
Meningkatnya koordinasi antar sektor	✓ % hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml koordinasi}}{\text{Jml. Tindaklanjut}} \times 100 \%$	Data Kecamatan Sukomoro	SKPD Kecamatan Sukomoro

51. Instansi : Kantor Kecamatan Kartoharjo
- Visi : Terwujudnya Organisasi Kecamatan Kartoharjo yang mampu menyelenggarakan pemerintahan yang baik ( Good Governance) dan mampu memberikan pelayanan prima menuju terciptanya kesejahteraan masyarakat.
- Misi : Percepatan Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pemerintahan Umum
- Tugas : Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan
- Fungsi :
- a. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
  - b. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Sosial;
  - c. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Ekonomi dan Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat;
  - d. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Pemuda dan Olahraga ;
  - e. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang – Undangan ;
  - f. Pengkoordinasian Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Pelayanan Umum ;
  - g. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan ;

- h. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi surat menyurat kepada masyarakat ;
- i. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan ;
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan ;
- k. Pembinaan Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan ;
- l. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Kecamatan dalam rangka pelaksanaan APBD;
- m. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan ; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	2	3	4	5
Meningkatnya Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	<p>Prosentase penduduk yang telah memiliki kartu identitas</p> <p>IKM terhadap pelayanan masyarakat</p>	<p>Jml pendd.yg telah memiliki kartu identitas</p> <p>_____ x 100%</p> <p>Jml penduduk</p> <p>Nilai IKM</p>	<p>Kantor Kecamatan Kartoharjo</p> <p>Kantor Kecamatan Kartoharjo</p>	<p>SKPD Kec. Kartoharjo</p> <p>SKPD Kec. Kartoharjo</p>

52. Instansi : Kantor Kecamatan Panekan

Visi : Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Daerah dan Desa yang efektif dan efisien

Misi : Percepatan Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Pelayanan Publik di Bidang Pemerintahan Umum

Tugas : Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian Urusan Otonomi Daerah dan Kemasyarakatan dalam Wilayah Kecamatan

Fungsi :

- a. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Sosial;
- c. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Ekonomi dan Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pengkoordinasian Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Pemuda dan Olahraga ;
- e. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang – Undangan ;
- f. Pengkoordinasian Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas Pelayanan Umum ;
- g. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan ;
- h. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi surat menyurat kepada masyarakat ;
- i. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan / atau Kelurahan ;

- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa atau Kelurahan ;
- k. Pembinaan Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) dilingkungan Kecamatan dan Kelurahan ;
- l. Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Kecamatan dalam rangka pelaksanaan APBD;
- m. Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggung jawab Kecamatan ; dan
- n. Pelaksanaan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
1	2	3	4	5
Meningkatnya Koordinasi, Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa/Kel se Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah koordinasi keamanan dan ketertiban umum	Koordinasi yang terlaksana _____ x 100% Jumlah Koordinasi	Kantor Kecamatan Pnekan	SKPD Kec. Panekan
	Jumlah Koordinasi pemerintahan dan pembangunan	Koordinasi yang terlaksana _____ x 100% Jumlah Koordinasi	Kantor Kecamatan Pnekan	SKPD Kec. Panekan

53. INSTANSI : KECAMATAN PONCOL
- VISI : Terwujudnya aparatur pemerintah yang profesional dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat guna mewujudkan pemerintah yang baik ( Good Governance )
- MISI : Meningkatkan kualitas Pelayanan Administrasi Umum  
Meningkatkan Kualitas Pembinaan, dan koordinasi di dalam daerah maupun diluar daerah.  
Meningkatkan tugas pemerintahan umum
- TUGAS : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan
- FUNGSI :
- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan sosial;
  - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;
  - e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan per Undang-undangan;
  - f. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - h. Pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat kepada masyarakat;
  - i. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan ;
  - j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
  - k. Pembinaan kepegawaian Pegawai Negri Sipil ( PNS ) di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;

1. Perencanaan kegiatan dan anggaran Kecamatan dalam rangka pelaksanaan APBD;
- m. Pelaksanaan kegiatan perencanaan , evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan prima bagi masyarakat	1. % Indek kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	IKM	Kecamatan Poncol	Subag Umum
	2. % Rekomendasi pelayanan Kependudukan yang tepat waktu sesuai SOP	$\frac{\text{Jml pel. tepat waktu}}{\text{Jml. Dok. Yg masuk}} \times 100$ %	Data Kecamatan Poncol	Subag umum
Meningkatnya koordinasi antar sektor	% hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jml koordinasi yg ditindak lanjuti}}{\text{Jml. koordinasi}} \times 100$ %	Data Kecamatan Poncol	SKPD Kecamatan Poncol



54. INSTANSI : KECAMATAN LEMBEBAN

VISI : *Terwujudnya pemerintahan yang baik ( Good Government ) melalui pelayanan prima dan kebersamaan*

MISI :

1. Mengembangkan sistem pelayanan yang murah, terukur dan akuntabel.
2. Membangun mekanisme pelayanan secara terintegrasi.
3. Mendorong terciptanya prakarsa masyarakat melalui pemberdayaan dalam bingkai kearifan lokal dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan diwilayah Kecamatan Lembeyan.
4. Mendorong terciptanya sinergitas pelaksanaan tugas dengan seluruh pemangku kepentingan se-Kecamatan Lembeyan baik secara vertikal maupun secara horisontal untuk dapat mendorong terciptanya mekanisme pembangunan yang berwawasan lingkungan.
5. Mengembangkan penguatan perencanaan secara *bottom up* (dari bawah) yang berlandaskan pada asas kebutuhan wilayah dan skala prioritas.
6. Mendorong masyarakat untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai religiusitas dan nilai-nilai kearifan lokal sebagai modal dasar dalam peningkatan kualitas kewilayahan di Kecamatan Lembeyan.

TUGAS : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan

FUNGSI :

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan sosial;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;

- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;
- e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan per Undang-undangan;
- f. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- h. Pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat kepada masyarakat;
- i. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan ;
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- k. Pembinaan kepegawaian Pegawai Negri Sipil ( PNS ) di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- l. Perencanaan kegiatan dan anggaran Kecamatan dalam rangka pelaksanaan APBD;
- m. Pelaksanaan kegiatan perencanaan , evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

NO	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KET
	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	2	3	4	5	6
1	Terselenggaranya pelayanan jasa dan administrasi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rata rata Indeks kepuasan masyarakat</li> </ul>	Formulasi Data Survey IKM	SKPD Kecamatan Lembeyan	SKPD Kecamatan Lembeyan
2	Meningkatnya Pelayanan Publik dibid. Adm. Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>persentase Pelayanan KK</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan KK dan KTP}}{\text{Jml Penduduk Wajib Memiliki KK dan KTP}} \times 100\%$	SKPD Kecamatan Lembeyan	SKPD Kecamatan Lembeyan

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Pelayanan Perekaman eKTP</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Perekaman e KTP} \times 100\%}{\text{Jumlah Penduduk Wajib e-KTP}}$	SKPD Kecamatan Lembeyan	SKPD Kecamatan Lembeyan
3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan administrasi dan keuangan Desa/ Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase SPJ ADD Desa/ Kelurahan yang telah diselesaikan</li> <li>• persentase Buku Profil Desa yang telah diselesaikan</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah SPJ ADD desa / Kelurahan} \times 100\%}{\text{Jumlah Desa/ Kelurahan}}$ $\frac{\text{Jml Buku Profil Desa/ Kelurahan} \times 100\%}{\text{Jumlah desa/ Kelurahan}}$	SKPD Kecamatan Lembeyan	SKPD Kecamatan Lembeyan
4	Meningkatnya dan Terbinanya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase Desa/ Kelurahan Lunas PBB</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Desa/ Kelurahan Lunas PBB} \times 100\%}{\text{Jumlah Desa/ Kelurahan}}$	SKPD Kecamatan Lembeyan	SKPD Kecamatan Lembeyan
5	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• persentase Penurunan Jumlah Konflik dan gangguan keamanan</li> </ul>	$\frac{\text{Jumlah Konflik yg telah dpt Diatasi} \times 100\%}{\text{Jumlah Konflik yang terjadi}}$	SKPD Kecamatan Lembeyan	SKPD Kecamatan Lembeyan

55. INSTANSI : KECAMATAN SIDOREJO
- VISI : *Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Magetan yang Adil, Mandiri dan Bermartabat*
- MISI :
1. Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Peran SDM Yang Profesional dilandasi semangat pelaksanaan Otonomi Daerah
  2. Mewujudkan prosedur pelayanan yang cepat, tepat, efektif dan efisien sehingga pelayanan prima dapat terwujud menuju Pemerintahan yang Baik
  3. Menciptakan Komunikasi dan Koordinasi Dengan Dinas / Instansi Terkait Dengan Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sehingga Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Bisa Terwujud.
- TUGAS : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan
- FUNGSI :
- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan sosial;
  - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;
  - e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan per Undang-undangan;
  - f. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;

- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- h. Pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat kepada masyarakat;
- i. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan ;
- j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- k. Pembinaan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- l. Perencanaan kegiatan dan anggaran Kecamatan dalam rangka pelaksanaan APBD;
- m. Pelaksanaan kegiatan perencanaan , evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

NO	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANGGUNG JAWAB	KET
	KINERJA UTAMA/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Peran SDM yang Profesional dilandasi Semangat Pelaksanaan Otonomi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % Kegiatan Peningkatan Tata Administrasi Pemerintahan Yang Baik</li> <li>• % Peningkatan Profesionalitas SDM Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan desa di Kec. Sidorejo</li> </ul>	<p>Jml Jenis lap. serta administrasi <u>keperintahan yg baik</u> X 100 Jml dok yg masuk</p> <p>Jml Jenis keg. <u>Peningkatan SDM Aparatur yg terealisasi</u> X 100 Jml Jenis Keg. Peningkatan SDM Aparatur</p>	SKPD Kecamatan Sidorejo	SKPD Kecamatan Sidorejo

2	Mewujudkan Prosedur Pelayanan Yang Cepat, Tepat, Efektif dan Efisien Sehingga Pelayanan Prima Dapat Terwujud Menuju Kepemerintahan Yang Baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Di Kec. Sidorejo</li> <li>• % Rekomendasi Pelayanan Kependudukan Yang Tepat Waktu Sesuai SOP</li> </ul>	<p>IKM</p> <p><math>\frac{\text{Jumlah Pelayanan Kepend.yg tepat waktu}}{\text{Jumlah dok yang masuk}} \times 100</math></p>	SKPD Kecamatan Sidorejo	SKPD Kecamatan Sidorejo
3	Menciptakan Komunikasi dan Koordinasi dengan Dinas/Instansi Terkait Dengan Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Sehingga Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Bisa Terwujud	<ul style="list-style-type: none"> <li>• % hasil koordinasi di bidang keamanan dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti Kelurahan yang telah diselesaikan</li> <li>• % kegiatan koordinasi bidang pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan</li> <li>• % Kegiatan Koordinasi Bidang Kesejahteraan Sosial</li> </ul>	<p><math>\frac{\text{Jml Koordinasi yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Koordinasi}} \times 100 \%</math></p> <p><math>\frac{\text{Jumlah Keg yg Terlaksana}}{\text{Jumlah target kegiatan}} \times 100 \%</math></p> <p><math>\frac{\text{Jml Kegiatan yg terlaksana}}{\text{Jml Target Kegiatan}} \times 100\%</math></p>	<p>SKPD Kecamatan Sidorejo</p> <p>SKPD Kecamatan Sidorejo</p> <p>SKPD Kecamatan Sidorejo</p>	<p>SKPD Kecamatan Sidorejo</p> <p>SKPD Kecamatan Sidorejo</p> <p>SKPD Kecamatan Sidorejo</p>

56. INSTANSI : KECAMATAN BARAT
- VISI : Terlaksananya Pelayanan Prima Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Kecamatan Barat Yang Maju, Dinamis dan Sejahtera
- MISI : Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Yang Profesional  
Meningkatkan Sistem Pelayanan Internal dan Eksternal  
Meningkatkan Kepekaan Aparatur Terhadap Perkembangan Situasi dan Kondisi Masyarakat
- TUGAS : Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan Kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan
- FUNGSI :
- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan sosial;
  - c. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan ekonomi dan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat;
  - d. Pengkoordinasian penyelenggaraan dan pembinaan pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga;
  - e. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan per Undang-undangan;
  - f. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - g. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
  - h. Pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat kepada masyarakat;
  - i. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan ;
  - j. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

- k. Pembinaan kepegawaian Pegawai Negri Sipil ( PNS ) di lingkungan Kecamatan dan Kelurahan;
- l. Perencanaan kegiatan dan anggaran Kecamatan dalam rangka pelaksanaan APBD;
- m. Pelaksanaan kegiatan perencanaan , evaluasi dan pelaporan terhadap kewenangan yang menjadi tanggungjawab Kecamatan;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati

<b>KINERJA UTAMA</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>
Meningkatkan Pelayanan dan Kebutuhan Kerja Aparatur	- % Penyediaan Kebutuhan Kerja Aparatur	$\frac{\text{Realisasi Penyediaan keb. Kerja}}{\text{Target Penyediaan Kebutuhan Kerja}} \times 100\%$	Kecamatan Barat	Kecamatan Barat
	- % Masyarakat Mendapatkan Pelayanan Yang Baik	Nilai IKM	Kecamatan Barat	Kecamatan Barat
Meningkatkan dan Memelihara Sarana dan Prasarana Aparatur	% Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Yang Dapat Dilaksanakan	$\frac{\text{Jml keg terlaksana}}{\text{Jml. kegiatan}} \times 100\%$	Kecamatan Barat	Kecamatan Barat
Melaksanakan Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Baik di Tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan	% Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Yang Dapat Dilaksanakan	$\frac{\text{Jml. Kegiatan terlaksana}}{\text{Jml Kegiatan}} \times 100\%$	Kecamatan Barat	Kecamatan Barat



57. INSTANSI : SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN MAGETAN
- V I S I : Terwujudnya peningkatan dan dukungan administrasi yang profesional serta prima terhadap kinerja Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik dan sejahtera.
- MISI :
- a. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur dalam memberikan layanan di bidang organisasi KORPRI dan Masyarakat.
  - b. Mewujudkan sarana dan prasarana yang lengkap dan fungsional bagi peningkatan kinerja Sekretariat KORPRI untuk kepentingan organisasi dan Pemerintahanan.
  - c. Mewujudkan kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan program dan kegiatan serta pelaporannya.
- TUGAS : Melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten.
- FUNGSI :
1. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerja sama
  2. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya mental, dan rohani
  3. Penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial.
  4. Pengoordinasian dan fasilitas penyelenggaraan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Magetan
  5. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI Kabupaten

No	KINERJA UTAMA		DEFINISI OPERASIONAL & FORMULA PERHITUNGAN	SUMBER DATA / PENANNGUNG JAWAB	KET
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA			
1	2	3	4	5	6
1	Terlaksananya kegiatan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia / Aparatur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah peserta pelaksanaan Pembekalan yang menjelang pensiun bagi anggota KORPRI dilaksanakan secara bertahap 1 Tahun 2 kali.</li> <li>- Jumlah Peserta anggota KORPRI yang mengikuti Pembinaan Mental dan Rohani bertahap 1 Tahun 2 kali pelaksanaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah peserta yang mengikuti Pembekalan Tahun 2015 sebanyak ± 475 Orang</li> <li>- Jumlah yang mengikuti sebanyak ± 1720 Orang dilaksanakan bertahap setiap 1 kali = 860 Orang</li> </ul>	<p>SEKRETARIAT DP. KORPRI</p> <p>SEKRETARIAT DP. KORPRI</p>	
2	Terlaksananya Pembinaan dan pemasyarakatan Olah Raga bagi anggota KORPRI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah anggota KORPRI yang mempunyai potensi Olah Raga untuk mengikuti kompetisi Olah Raga</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah peserta yang berpotensi dalam pembinaan ± 52 Orang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SEKRETARIAT DP. KORPRI</li> </ul>	
3	Terlaksananya intensif Penanganan pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jml Survei IKM untuk memberikan saran /usul pengembangan organisasi Program dan Kegiatan di Sekretariat KORPRI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prosentase Survei Indeks Kepuasan Masyarakat untuk ditindak lanjuti diperkirakan ± 90 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SEKRETARIAT DP. KORPRI DAN DINAS TERKAIT</li> </ul>	

4	Terlaksananya pelaksanaan Musyawarah Kab. KORPRI untuk pelaksanaan AD & ART KORPRI	- Jumlah Pengurus dari Dinas / Instansi / Kantor / Badan / Kecamatan se Kabupaten	- Jumlah yang diikuti sebanyak ± 60 Dinas / Instansi / Kecamatan	- DEWAN PENGURUS KORPRI	
5	Kinerja anggota Pengurus dan Sekretariat DP. KORPRI untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan meningkatkan profesional Organisasi kelembagaan	- Jumlah penghargaan yang diperoleh sesuai dengan program dari KORPRI Tingkat Propinsi Jawa Timur.	- Mendapatkan penghargaan di bidang profesional, award, Olah Raga dan Seni Paduan Suara, Tingkat Propinsi Jawa Timur sejumlah 4 penghargaan, Tahun 2013 – 2014	- SEKRETARIAT DP. KORPRI	

BUPATI MAGETAN,

TTD

S U M A N T R I